

**PENELITIAN PERAN SATGASPAMTAS RI-PNG  
DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NKRI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 18.306 buah serta luas wilayah 1,9 juta km<sup>2</sup>, secara geografis letaknya sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara samudera Hindia dan Pasifik. Secara geografis Indonesia berbatasan dengan beberapa negara, baik di darat maupun laut. Di wilayah daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Wilayah perbatasan membawa dampak positif (sebagai asset berharga), maupun berupa ancaman tersendiri bagi kedaulatan Indonesia. Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu Negara (sovereignty), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Keamanan perbatasan suatu negara menjadi perhatian pemerintah terutama bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda mulai dari aspek fisik batas wilayah, aspek ekonomi, aspek sosial budaya serta aspek pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan RI-PNG rentan terjadi permasalahan, karena perbatasan tersebut dijadikan basis Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB) untuk melancarkan aksinya sehingga mengganggu keamanan nasional Indonesia.

b. Perbatasan RI-PNG di Papua yang membentang dari Utara (Skow) ke Selatan (Sota), dengan panjang kurang lebih 780 Km, memerlukan penggelaran kekuatan yang cukup besar dalam rangka menjaga wilayah

perbatasan. Penggelaran kekuatan Satuan Pamtas RI-PNG saat ini dilaksanakan oleh satuan organik dan non organik yang BKO kepada Kodam XVII/Cenderawasih. Gelar satuan Pamtas RI-PNG dari Utara s.d. Selatan menempati 94 Pos (jumlah Pos yang berada di wilayah Korem 172/PW maupun Korem 174/ATW, masing-masing terdapat 47 Pos), bila dihadapkan dengan panjang garis perbatasan RI-PNG masih terdapat wilayah yang tidak dijaga oleh Pos Pamtas. Jarak antara Pos Pamtas dengan Pos Pamtas lainnya rata-rata masih cukup jauh dan jarak Pos Pamtas ke perbatasan RI-PNG masih relatif jauh, seperti Pos Kaliup ( $\pm 26$  Km), Pos Jembatan Skamto ( $\pm 25$  Km) dan Pos KM 31 ( $\pm 25$  Km), sehingga pengawasan Pos untuk mencegah kegiatan illegal di wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat dari ancaman GSPB, belum dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Menyikapi aktifitas kelompok GSPB yang dapat mengancam terjadinya disintegritasi bangsa di wilayah Papua, maka salah satu langkah yang telah diputuskan oleh Pemerintah, adalah dengan menugaskan satuan TNI AD sebagai satuan pengamanan perbatasan RI-PNG dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Papua. Memperhatikan kondisi Satgas Pamtas yang digelar di sepanjang perbatasan Papua, Tim peneliti telah berusaha mengumpulkan data dan fakta tentang kondisi Satgas Pamtas di wilayah Papua dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di perbatasan, baik untuk mengatasi ancaman yang dihadapi pada masa sekarang maupun mengatasi ancaman yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Kedepan, diharapkan Satgas Pamtas akan semakin eksis berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi di perbatasan, guna menjaga tetap tegaknya kedaulatan NKRI di wilayah Papua.

2. **Identifikasi Masalah.** Untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah Satgaspamtas dapat menciptakan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Papua ?
- b. Apakah Satgaspamtas dapat mencegah ke luar masuknya kelompok gerakan separatis di wilayah perbatasan Papua ?
- c. Apakah Satgaspamtas dapat mengamankan patok batas negara di wilayah Papua ?

- d. Apakah Satgaspamtas dapat mencegah pelintas batas ilegal, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan ?
- e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Satgaspamtas dalam melaksanakan pengamanan perbatasan di Papua ?

### 3. **Tujuan dan manfaat penelitian.**

a. **Tujuan penelitian.** Untuk mengetahui apakah Satgas Pamtas di Papua sudah melaksanakan tugas sesuai dengan perannya.

b. **Manfaat penelitian.**

- 1) Bagi TNI AD, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam merumuskan peranan Satgas pamtas di Papua.
- 2) Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dalam menentukan kebijakan pengembangan/pengelolaan infrastruktur di wilayah perbatasan guna meningkatkan efektifitas pembangunan di wilayah perbatasan Papua.

4. **Metode Penelitian.** Untuk dapat mengetahui seberapa besar peran Satgaspamtas dalam menjaga wilayah perbatasan di Papua, maka dalam penelitian digunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memanfaatkan informasi kuantitatif maupun kualitatif melalui survei primer dan survei sekunder. Survei primer dilakukan dengan mencari informasi langsung dengan pengamatan lapangan, wawancara dan penyebaran angket. Data sekunder dilakukan dengan studi literature, laporan dan studi yang relevan dengan obyek studi. Khusus untuk angket pertanyaan dan jawaban disusun dalam skala Likert, dengan jumlah responden yang mewakili Pemda, Satgaspamtas, TNI AL, TNI AU dan Kepolisian. Penyusunan ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui kecenderungan responden terhadap suatu persoalan pertanyaan. Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Likert, sehingga metode analisis ini selanjutnya dikenal dengan nama analisis skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat menunjukkan tanggapan responden terhadap karakteristik suatu obyek dengan memberikan pendapat ordinal. Pemberian pendapat tersebut dilakukan dengan memberikan pilihan jawaban dengan rentang sangat setuju atau sesuai hingga sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai. Rentang skala yang digunakan pada umumnya adalah angka 1 hingga 5. Angka ini juga memiliki fungsi sebagai bobot nilai. Penamaan rentang angka 1 hingga 5 dapat didefinisikan sebagai berikut;

- a. Nilai "5" berarti sangat setuju/sesuai (SS)
- b. Nilai "4" berarti setuju/sesuai (S)
- c. Nilai "3" berarti normal (N)

- d. Nilai "2" berarti tidak setuju/tidak sesuai (TS)
- e. Nilai "1" berarti sangat tidak setuju/ sangat tidak sesuai (STT)

Pemberian jawaban pertanyaan dengan menggunakan angka atau skala tersebut, selanjutnya dikelompokkan, ditabulasikan dan dijumlahkan sehingga dapat diketahui nilai skor secara keseluruhan dari masing-masing responden. Skor keseluruhan atau skor total ini kemudian dibagi dengan skor maksimal yang dapat diperoleh dari setiap pertanyaan, sehingga dapat diketahui pada rentangan nilai berapakah persepsi dari responden tersebut. Skor diperoleh dengan menjumlahkan angka pada setiap jawaban pertanyaan yang dikalikan dengan bobot berdasarkan jawaban yang diberikan. Berikut ini adalah contoh tahapan perhitungan skor dengan menggunakan analisis skala Likert :

- a. Dari 62 responden, diperoleh rincian jawaban sebagai berikut:
  - 1) 9 orang responden menjawab SS
  - 2) 33 orang responden menjawab S
  - 3) 14 orang responden menjawab N
  - 4) 4 orang responden menjawab TS
  - 5) 2 orang responden menjawab STT
- b. Berdasarkan jawaban tersebut, maka skor total dapat dihitung sebagai berikut:  $(9 \times 5) + (33 \times 4) + (14 \times 3) + (4 \times 2) + (2 \times 1) = 229$ .

Skor maksimal yang dapat diperoleh dari seluruh responden adalah 62 responden x 5 (bobot tertinggi) = 310

- c. Dengan demikian, maka skor akhir yang dapat diperoleh dari jawaban responden tersebut adalah  $229/310 \times 100\% = 73.87\%$ .

Melalui perhitungan dengan menggunakan skala Likert, maka pada hasil akhir perhitungan akan diperoleh nilai persentase yang menunjukkan tingkatan persepsi responden terhadap pertanyaan. Persentase tersebut dapat diinterpretasikan berdasarkan rentangan nilai sebagai berikut:

- 1) 0 -20 % = sangat lemah
- 2) 21-40% = lemah
- 3) 41-60% = cukup
- 4) 61-80% = kuat
- 5) 81-100% = sangat kuat

Dengan menggunakan rentangan nilai tersebut, maka dapat diketahui seberapa kuat atau lemahnya penilaian responden terhadap persoalan yang ditanyakan melalui pengumpulan angket ataupun kuesioner. Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah survei lapangan dengan

pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menentukan sample secara purposive dari responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pa, Ba dan Ta Kowil TNI AD, Pa, Ba dan Ta TNI AL/TNI AU dan Kepolisian yang bertugas di Papua khususnya yang berdekatan dengan wilayah perbatasan, Pa, Ba dan Ta anggota Satgaspamtas, personel pemerintah kabupaten dan Kota yang memiliki wilayah berbatasan darat dengan negara PNG dan masyarakat sekeliling perbatasan berusia di atas 18 tahun baik petani, buruh maupun peternak.

5. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Pembahasan tulisan ini dibatasi pada peran Satgas Pamtas dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan RI-PNG Papua, dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Tinjauan Konseptual
- c. Deskripsi Wilayah Perbatasan Papua
- d. Pembahasan Hasil Penelitian
- e. Kesimpulan dan Saran.
- f. Penutup.

6. **Pengertian-pengertian.**

- a. **Peran** adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, partisipasi.
- b. **Pilar Batas** adalah Meridians Monumen atau tugu perbatasan yang dipasang oleh kedua Negara yang tergelar sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG.
- c. **Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG (Satgas Pamtas RI-PNG)** adalah satuan tempur yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan perbatasan wilayah darat RI-PNG di Papua dalam rangka menjamin teganya kedaulatan NKRI dengan tugas pokok mengamankan perbatasan RI-PNG, mencegah pergeseran patok, mencegah kegiatan ilegal di wilayah perbatasan, mencegah aksi-aksi Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB) dan menyelenggarakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan RI-PNG.
- d. **Ondoafi** adalah suatu istilah bagi seorang kepala suku yang berada di Papua, yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakatnya.
- e. **Ondofolo** adalah suatu istilah bagi seorang kepala suku besar yang berada di Papua, membawahi beberapa ondoafi-ondoafi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

7. **Umum.** Pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan mengacu kepada keputusan pemerintah dan petunjuk operasi yang bersifat konseptual, dengan demikian untuk memudahkan penelitian ini perlu ditinjau dari aspek peranti lunak yang bersifat konseptual. Dalam bab II ini diuraikan beberapa peranti lunak yang menuntun pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-PNG di Papua dihadapkan dengan hasil penelitian di lapangan. Peranti lunak bersifat konseptual operasional yang perlu ditinjau antara lain : Direktif Panglima TNI, Buku Petunjuk Lapangan tentang penyelenggaraan Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat beserta beberapa Buku Petunjuk Pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan operasi Satgaspamtas.

8. **Direktif Panglima TNI tentang Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat Indonesia-PNG di Papua.** Direktif yang dikeluarkan Panglima TNI, digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan operasi pengamanan perbatasan wilayah darat Indonesia-PNG di Papua mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2010, dengan tujuan agar amannya situasi perbatasan darat Indonesia-PNG di Papua dari setiap ancaman dan gangguan serta kegiatan ilegal. Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan operasi adalah :

- a. Terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang wilayah perbatasan darat Indonesia-PNG di wilayah Papua.
- b. Tercegah bebasnya gerakan separatis Papua bersenjata (GSPB) keluar/masuk disepanjang perbatasan darat Indonesia-PNG di wilayah Papua.
- c. Terjaminnya keamanan posisi patok batas yang sudah ada.
- d. Terwujudnya wilayah yang bebas dari pelintas batas ilegal, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.

9. **Buku Petunjuk Lapangan tentang Operasi Pengamanan Perbatasan Darat.**

- a. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengevaluasian.

1) Perencanaan.

a) Mabes TNI-AD.

(1) Mengeluarkan ST dan Direktif dari Mabes TNI tentang operasi pengamanan wilayah perbatasan dan direktif latihan kepada Pangkotama Ops.

(2) Menerima paparan rencana operasi dan latihan pengamanan perbatasan dari Pangkotama Ops.

(3) Melakukan pemeriksaan kesiapsiagaan satuan tugas yang akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan.

(3) Merencanakan dukungan yang diperlukan Kodam.

b) Kodam wilayah perbatasan selaku Koops.

(1) Menjabarkan direktif operasi dan latihan untuk menjadi RO dan rencana latihan.

(2) Menyusun organisasi satuan tugas.

(3) Merencanakan penempatan pos di wilayah perbatasan.

(4) Mengeluarkan perintah persiapan kepada satuan organik yang akan melaksanakan tugas pengamanan.

(5) Merencanakan latihan pratugas satuan organik yang akan melaksanakan tugas operasi.

(6) Merencanakan dan mengatur penempatan pos di wilayah perbatasan.

(7) Menerima dan mengoperasikan satuan Bawah Komando Operasi (Bakoops) dari Kotama Ops TNI lainnya.

c) Kodam/Kotama Ops yang memberikan unsurnya kepada Kodam perbatasan dengan status bawah komando operasi.

(1) Menjabarkan direktif latihan Panglima TNI untuk menjadi rencana latihan pratugas.

(2) Menyusun organisasi satuan tugas sesuai direktif Panglima TNI.

(3) Merencanakan dukungan personil dan materiil yang diperlukan Satgas Pamtas.

(4) Menyelenggarakan latihan pratugas.

(5) Mengeluarkan perintah persiapan pelaksanaan tugas operasi pengaman perbatasan, kepada satuan-satuan pelaksana.

d) Korem wilayah perbatasan selaku Kolakops.

(1) Membuat RO dan dipaparkan kepada Pangdam.

(2) Menentukan pos-pos pengamanan sesuai rencana yang sudah ditentukan oleh Kodam.

(3) Merencanakan dukungan yang diperlukan Satgas Pamtas.

e) Satgas Pam Perbatasan/Batalyon Penugasan.

(1) Menyusun organisasi tugas Satgas Pam Perbatasan sesuai ketentuan dari Komando Atas.

(2) Merencanakan Latihan guna mendukung penugasan, berupa latihan satuan dari Latorsar hingga UST Ki.

(3) Mengadakan koordinasi dengan Satgaspamtas yang akan digantikan.

(4) Menyusun organisasi Korum untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan satuan di pangkalan sesuai personil yang tersedia.

2) Persiapan.

a) Mabes TNI-AD

(1) Melakukan pemeriksaan akhir kesiapan satuan sebelum diperiksa oleh Asops Panglima TNI.

(2) Mengirimkan Tim dari Dispsiad untuk melakukan:

- (a) Pemeriksaan Psikologi terhadap Satgas.
  - (b) Pembekalan Psikologi terhadap Satgas.
  - (c) Konseling Psikologi terhadap Satgas, Korum dan Persit (dalam bentuk ceramah).
- (3) Ditkesad melakukan kegiatan ceramah terhadap Korum dan Persit yang dimulai dengan kegiatan :
  - (a) Pemeriksaan Kesehatan.
  - (b) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
  - (c) Memeriksa bekal obat-obatan yang akan dibawa ke daerah perbatasan.
- (4) Melengkapi kekurangan materiil dan perlengkapan tugas yang tidak dapat didukung Kotama.
- 5) Melaporkan kesiapan Satgas Pamtas ke Mabes TNI.
- b) Kodam wilayah perbatasan selaku Koops.
  - (1) Mengeluarkan perintah persiapan kepada satuan organik yang akan melaksanakan tugas pengamanan.
  - (2) Mendukung kekurangan personil dan materiil Satgas Pamtas bagi satuan organik yang akan berangkat tugas.
  - (3) Menyelenggarakan latihan Pratugas satuan organik yang akan melaksanakan tunas cendrawasi.
  - (4) Mengawasi pelaksanaan Latihan Pratugas bagi satuan organik yang akan berangkat tugas.
  - (5) Melakukan pengecekan akhir sebelum dilaksanakan peninjauan kesiapan oleh Mabesad bagi satuan organik yang akan berangkat tugas.
  - (6) Menerima dan mengoperasionalkan satuan Bawah Komando Operasi (Bakoops) dari Kotama Ops TNI lainnya.
  - (7) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Border Liaison Meeting (BLM) dalam rangka pembuatan RO Kodam.

c) Kodam/Kotama operasi yang memberikan unsurnya kepada Kodam perbatasan dengan status Bawah Komando Operasi (BKO).

- (1) Melakukan pengecekan akhir sebelum dilaksanakan peninjauan kesiapan oleh Mabesad.
- (2) Mendukung kekurangan personil dan materiil Satgas Pamtas.
- (3) Menyelenggarakan latihan pratugas.
- (4) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Latihan Pratugas.
- (5) Menyiapkan pemberangkatan Satgas Pamtas ke daerah operasi.
- (6) Merencanakan latihan pratugas.

d) Korem wilayah perbatasan selaku Kolakops.

- (1) Menyiapkan serah terima Dansatgas Pamtas beserta seluruh inventaris dan permasalahan yang ada di daerah penugasan.
- (2) Melakukan pengecekan kesiapan akhir jaring komunikasi Kodam Satgas Pamtas.
- (3) Melakukan evaluasi protap dan kebijakan pengamanan sesuai perkembangan situasi yang dihadapi.
- (4) Menyiapkan rencana penempatan pasukan di pos-pos perbatasan sesuai dengan perkembangan situasi terakhir.

e) Satgas Pengamanan Perbatasan/Batalyon Penugasan.

- (1) Penyiapan personil untuk memenuhi Orgas Satgaspamtas yang ditentukan melalui seleksi kesehatan fisik dan laboratorium, pemeriksaan Psikologi, Pemeriksaan Kesehatan.
- (2) Penyiapan materiil yang akan dibawa serta pengajuan kekurangan ke Komando Atas.

(3) Melaksanakan Latihan Pratugas yang disesuaikan dengan kondisi daerah penugasan.

(4) Menyusun Protap daerah operasi Pam Perbatasan.

(5) Membuat buku pedoman perorangan untuk tugas di daerah perbatasan.

3) Pelaksanaan. Titik berat operasi pengamanan perbatasan Kodam XVII/Cend adalah melaksanakan pengamanan terhadap pelanggaran batas wilayah, infiltrasi, dan kegiatan ilegal lainnya serta mencegah daerah perbatasan yang digunakan sebagai basis OPM.

a) Sasaran Operasi.

(1) Terciptanya stabilitas keamanan disepanjang wilayah perbatasan darat Indonesia-PNG di wilayah Papua.

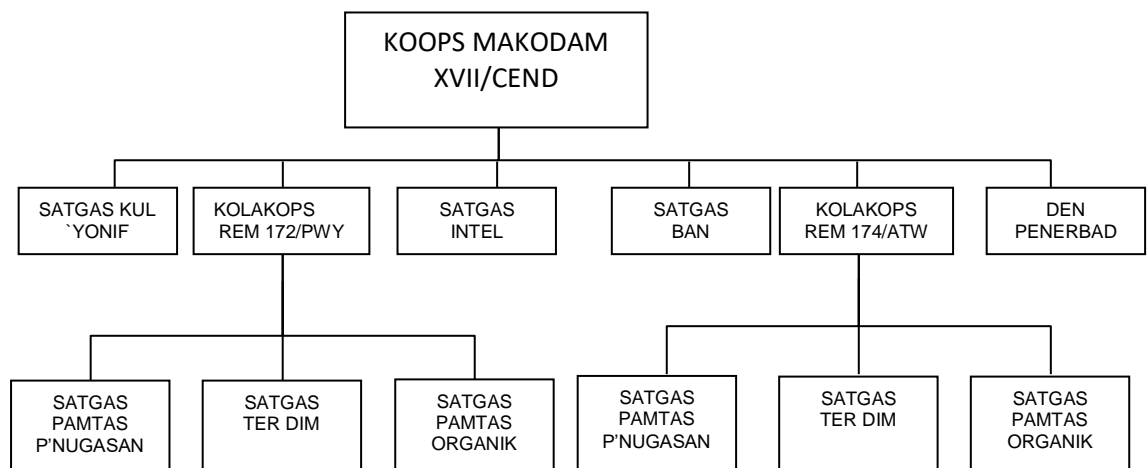
(2) Tercegah bebasnya gerakan separatis Papua bersenjata (GSPB) keluar/masuk disepanjang perbatasan darat Indonesia-PNG di wilayah Papua.

(3) Terjaminnya keamanan posisi patok batas yang sudah ada.

(4) Terwujudnya wilayah yang bebas dari pelintas batas ilegal, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.

b) Organisasi Tugas

#### **ORGAS PAMTAS DARAT RI - PNG**



4) Pengevaluasian. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan.

10. **Rencana Operasi (RO) Tameng Panah-02.**

a. **Tugas Pokok.** Kodam XVII/Cen selaku Koops TNI Papua beserta perkuatannya melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan wilayah darat Indonesia-PNG mulai hari "H" Jam "J " selama 365 hari di sepanjang perbatasan RI-PNG dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

b. **Pelaksanaan.**

1) Konsep Operasi.

a) Manuver. Melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan wilayah darat Indonesia-PNG mulai Hari H Jam J selama 365 hari di sepanjang perbatasan RI-PNG dengan menggelar 2 Kolakops diperkuat serta 1 Brigif (-) dan 1 Yonif (-) sebagai cadangan.

b) Bantuan.

(1) Intelijen/Bais TNI. Memberikan data intelijen terkini terutama informasi kegiatan GSPB/luar negeri yang mengakses jaringan ke Papua.

(2) Laut. Lantamal X Jayapura dan XI Merauke memberikan pengamanan laut di sekitar perbatasan RI-PNG dari usaha-usaha penyelundupan.

(3) Udara. Kosek IV memberikan informasi tentang pelanggaran wilayah udara di perbatasan RI-PNG.

2) Tugas Satuan Manuver.

a) Kolakops Rem 172/PVY.

(1) Amankan perbatasan wilayah darat RI-PNG dan cegah pemindahan patok batas dari MM 1 s.d. MM 7.2 serta buat tanda-tanda dari Pos ke patok batas di sektor tanggung jawabnya.

(2) Ciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat RI - PNG.

(3) Cegah pelintas batas ilegal, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.

(4) Cegah keluar masuk GSP/i sepanjang perbatasan RI-PNG.

(5) Amankan masyarakat yang berada di sekitar perbatasan dan pengaruh dan ancaman GSPB.

(6) Wujudkan kesadaran masyarakat yang berada di sekitar perbatasan untuk mematuhi dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

(7) Aktifkan Pembinaan Teritorial untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(8) Laksanakan pergeseran Pos Perbatasan yang belum mencapai j: 5 Km dari garis perbatasan RI-PNG sesuai kemampuan.

(9) Beralih ke operasi selanjutnya atas perintah.

b) Kolakops Rem 174/ATW.

(1) Amankan perbatasan wilayah darat RI - PNG dan cegah pemindahan patok batas dari MM 7.3 s.d MM 14 serta buat tanda-tanda dari Pos ke patok batas di sektor tanggung jawabnya.

(2) Ciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat RI - PNG.

(3) Cegah pelintas batas ilegal, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.

(4) Cegah keluar masuk GSPB di sepanjang perbatasan RI-PNG.

(5) Amankan masyarakat yang berada di sekitar perbatasan dari pengaruh dan ancaman GSPB.

(6) Wujudkan kesadaran masyarakat yang berada di sekitar perbatasan untuk mematuhi dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

(7) Aktifkan Pembinaan Teritorial untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(8) Laksanakan pergeseran Pos Perbatasan yang belum mencapai j: 5 Km dari garis perbatasan RI-PNG sesuai kemampuan.

(9) Beralih ke operasi selanjutnya atas perintah.

### BAB III

#### DESKRIPSI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

11. **Umum.** Hasil studi lapangan selama melaksanakan penelitian di perbatasan Papua, Tim peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang bertugas di perbatasan, baik dari petugas Pamtas, Satkowil, petugas Kepolisian, aparat Pemda dan dari berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya Tim peneliti mendapatkan data dari hasil penyebaran ceklis yang diberikan kepada masing-masing responden sebanyak 680 orang, yang terdiri dari responden Satgaspamtas dan Satkowil sebanyak 510 orang, responden TNI AL, TNI AU dan Polri sebanyak 60 orang dan dari petugas Pemda dan masyarakat sebanyak 110 orang. Adapun data yang berkaitan dengan peran Satgaspamtas dalam menjaga kedaulatan NKRI yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Peneliti akan diuraikan pada pasal dibawah ini.

12. **Keadaan Wilayah Perbatasan RI-PNG.** Permasalahan wilayah perbatasan bukan hanya tentang garis perbatasan antar negara, namun yang terpenting bahwa perbatasan suatu negara termasuk Indonesia dengan negara lain, merupakan simbol tegaknya kedaulatan suatu negara, yang berarti bahwa persoalan wilayah perbatasan bukan hanya sekedar menegaskan garis wilayah batas negara, tetapi jauh lebih penting bahwa perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk kepentingan nasional. Adapun permasalahan di daerah perbatasan selama ini menyangkut pelanggaran perbatasan, pelanggaran prosedural keimigrasian (pelintas batas illegal), trafficking (penyelundupan/penjualan manusia), pencurian sumber daya alam, bahkan dijadikan sebagai basis kelompok separatis terutama di wilayah yang sulit/ jauh dari pengawasan. Oleh karenanya, penataan pengembangan peran satuan TNI AD yang tergabung dalam Satgas Pamtas di wilayah perbatasan RI-PNG merupakan salah satu upaya untuk mengeleminir permasalahan-permasalahan tersebut, dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu dan mendasari pada ketentuan-ketentuan/perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan resistensi.

**Gambar. 3.1**  
**Peta Wilayah Perbatasan RI PNG**



- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain : pertama, belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Kedua, Kesenjangan kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, luas dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten; keterbatasan aksesibilitas yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan. Keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah. Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali khususnya pembalakan hutan secara legal maupun illegal, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang berbatasan, mendorong terjadinya kegiatan illegal di daerah perbatasan darat seperti, perdagangan illegal, lintas batas illegal, penambangan illegal dan penebangan hutan secara illegal.

Memperbaiki kondisi tersebut untuk memajukan daerah perbatasan darat, perlu dilakukan upaya dan langkah konkrit terutama penataan di bidang aspek kesejahteraan dan stabilitas keamanan.

b. Masalah lain yang dihadapi di daerah perbatasan adalah, jumlah dan penyebaran penduduk yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur jalan, kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah, pengolahan industri belum berkembang sehingga kegiatan perekonomian masih tergantung pada produk mentah. Pengelolaan sumber daya alam terutam hasil hutan kurang terkendali serta lemahnya sistem informasi dan komunikasi mendorong terjadinya kegiatan ilegal.

c. Kondisi daerah perbatasan ditinjau dari perspektif pertahanan dan keamanan, berada pada tahap mengawatirkan ditandai dengan lepasnya kedaulatan RI atas Pulau Sipadan dan Ligitan, kasus Blok Ambalat, kasus Pulau Bidadari dan permasalahan pelintas batas negara. Perbatasan darat kedua negara dalam satu rangkaian pulau antara Indonesia-PNG berjajar dari utara ke selatan  $\pm$  780 km terletak dari garis batas / MM 1 di daerah Skouw dan Wutung kota Jaya Pura s.d MM 14 di daerah muara sungai Torasi kabupaten Merauke. Pembangunan tugu pilar batas dilaksanakan mulai tahun 1966-1967 dibangunlah 14 MM sebagai lintasan dari RI ke PNG atau sebaliknya, selanjutnya pada tahun 1982-1990 kedua negara sepakat membangun 8 pilar batas, sehingga secara total sampai dengan sekarang menjadi 52 pilar batas. Dari jumlah pilar batas tersebut, 24 pilar batas diantaranya menjadi tanggung jawab pemerintah RI seperti pada Tabel 3.1.:

**Tabel 3.1**  
**LOKASI PILAR BATAS**

NO	PILAR BATAS	LOKASI	LINTANG	TANGGUNG JAWAB		KET
	(MM)			RI	PNG	
		141° 00' 00"				
1	MM. 1	Wutung	2° 35' 39"	-	PNG	
2	MM. 2	New Moso	2° 40' 42"	RI	-	
3	MM. 2.1	Niau	2° 46' 30"	RI	-	
4	MM. 2.2	(Sei) Sangke	2° 53' 44"	RI	-	
5	MM. 2.3	Sawan/Samna	2°57' 13"	RI	-	
6	MM. 3.A	Skotiau	3° 01'11"	RI	-	
7	MM. 4.A	Waris Kenandega	3°14' 06"	RI	-	
8	MM. 4.1	Senck	3°17'57"	RI	-	
9	MM. 4.2	Juwela	3° 28' 30"	RI	-	
10	MM. 4.3	Kamberatoro/Amgotro	3° 34' 26"	RI	-	
11	MM. 4.4	Pananggan Track	3° 39' 17"	RI	-	
12	MM. 4.5	Kambriap Track	3° 39'26"	-	PNG	
13	MM. 5	Sei Hauser/Wusme	3° 55'16"	-	PNG	
14	MM. 5.1	Biksi	-4° 03'38"		PNG	
15	MM. 6.A	Sei Sepik	4° 08' 39"	-	PNG	
16	MM. 6.1	Batom	4° 23'58"	-	PNG	
17	MM. 6.2	Sei Sepik	4°33'50"	-	PNG	
18	MM. 6.3	Tumolbil	4° 45' 00"	-	PNG	
19	MM. 7	Star Mountain	4° 54' 54"	-	PNG	
20	MM. 7.1	Kawentikin	5° 08" 41"	-	PNG	
21	MM. 7.2	Kiwirok	5° 11' 59"		PNG	
22	MM. 7.3	Kugo	5° 17"56"	-	PNG	
23	MM. 7.4	Longoromngo	5° 27" 30"	-	PNG	
24	MM. 7.5	Irimkwi	5° 29" 34"	-	PNG	
25	MM. 7.6	Bankin	5° 33" 55"	-	PNG	
26	MM. 7.7	Kurumkin	5° 36" 40"		PNG	
27	MM. 8	Inggembit	5° 38" 33"	-	PNG	
28	MM. 8.1	Ninati/Opka	5° 42' 04"	-	PNG	
29	MM. 8.2	Onombitan	5° 47"23"	-	PNG	
30	MM. 9	Jat	5° 52' 39"	-	PNG	
31	MM. 9.1	Atkamban	5° 59'32"	-	PNG	
32	MM. 9.2	Angkeh	6° 04' 58"	-	PNG	
33	MM. 10	Angamarut	6° 19' 32"	-	PNG	
		141° 01' 10"				
34	MM. 11.A	Domongi	6° 53' 26"	-	PNG	
35	MM. 11.1	Nake Track	7° 06' 05"	-	PNG	
36	MM. 11.2	Koropa Track	7° 17'10"	-	PNG	
37	MM. 11.3	Maroa Track	7° 27' 16"	-	PNG	
38	MM. 11.4	Obo Track	7° 31'38"	-	PNG	
39	MM. 11.5	Track	7° 37' 01"	RI	-	
40	MM. 11.6	Track	7° 40' 59"	RI	-	
41	MM. 12	Sei Wawai	7° 49'19"	RI	-	
42	MM. 12.1	Erambu	8° 00'48"	RI	-	
43	MM. 12.2	Kamde	8° 02' 36"	RI	-	
44	MM. 12.3	Jalan Trans Irian	8° 04' 08"	RI	-	
45	MM. 12.4	Jalan Trans Irian	8° 07' 45"	RI	-	
46	MM. 12.5	Jalan Trans Irian	8° 11'58"	RI	-	
47	MM. 12.6	Jalan Trans Irian	8° 13'33"	RI	-	
48	MM. 13	Sota/Botar	8° 25'45"	RI	-	
49	MM. 13.1	Yanggandur Track	8° 36'19"	RI	-	
50	MM. 13.2	Yanggandur Track	8° 38' 47"	RI	-	
51	MM. 13.3	Sakiramke	8° 52' 29"	RI	-	
52	MM. 14.A	Muara Bensbach	9° 07' 34"	RI	-	
	Penanggungjawab Pemeliharaan/Pembersihan			24	28	

d. Perbatasan RI-PNG memiliki dua pintu pos pelintas batas yaitu di Skow Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun di Skow saat ini sudah dibangun fasilitas pemeriksaan seperti Beacukai, Imigrasi, pos Polisi, karantina dan Pos Pamantas TNI. Mengatasi keterbatasan prasarana dan sarana darat di perbatasan RI-PNG, saat ini dikembangkan perhubungan udara perintis dengan menggunakan pesawat kecil, seperti Twin Otter atau Cessna yang dapat menjangkau wilayah perbatasan. Selain transportasi darat dan udara, transportasi yang digunakan masyarakat Papua juga menggunakan transportasi laut dan sungai. Di propinsi Papua terdapat pelabuhan laut di Jayapura dan pelabuhan udara di Sentani. Di Kabupaten Merauke terdapat pelabuhan kelas III yaitu pelabuhan Agats dan Pelabuhan Bade. Transportasi yang dapat dilayari oleh kapal laut adalah Sungai Memberamo dan Sungai Tor. Transportasi sungai yang dapat melayani distribusi barang ke wilayah tengah propinsi Papua digunakan Sungai Maro dan sungai yang berada di Merauke. Kondisi sungai yang di perbatasan Papua sangat unik, karena banyak sungai yang berujung pada rawa-rawa sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal sebagai sarana transportasi wilayah.

e. Pola pemukiman penduduk di wilayah perbatasan Papua terkonsentrasi di kota-kota distrik dan desa-desa. Keadaan kayu, papan, rumbia dengan ventilasi yang kurang, sehingga pada saat musim hujan kondisi rumah menjadi lembab yang memungkinkan hidupnya bakteri-bakteri yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Di wilayah perbatasan masih terdapat penduduk yang berladang secara berpindah-pindah. Wilayah perbatasan Papua memiliki SDA yang melimpah berupa hutan (hutan lindung/taman nasional dan hutan produksi). Sumber daya alam yang berada di berbatasan belum dimanfaatkan secara maksimal, kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumber daya hutan, wilayah perbatasan juga memiliki potensi sumber daya alam yang belum di olah seperti, tambang emas, tembaga dan logam lainnya. Potensi pengembangan tanaman pangan dan perkebunan di wilayah perbatasan masih sangat besar dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara maksimal.

f. Komitmen pemerintah pusat terhadap masalah perbatasan RI-PNG dinilai masih rendah, padahal aspek politik ini yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Visi dan misi pengelolaan perbatasan masih dalam proses pembentukan draf yang dilakukan oleh Bappenas dengan membentuk Badan Nasional Pengelolaan Daerah Perbatasan (BNPDP) di tingkat pusat dan Propinsi namun belum diikuti oleh tingkat Kabupaten sampai Kecamatan. Wilayah perbatasan RI-PNG termasuk daerah tertinggal, karena itu kondisi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat masih relatif rendah. Kontribusi terbesar PDRB wilayah perbatasan Papua berasal dari sektor pertanian kecuali Kota Jayapura. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sangat lamban, disebabkan :

- 1) Lokasinya relatif terisolir (terpencil) dengan ketersediaan aksesibilitas yang sangat terbatas.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat wilayah perbatasan berupa desa tertinggal dengan tingkat ekonomi masyarakat miskin.
- 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan (blank spot).

g. Masyarakat perbatasan RI-PNG memiliki budaya serumpun dan bersaudara, karena itu saat berkunjung ke tempat saudaranya sering melintas batas. Penduduk perbatasan hidup secara komunal berdasarkan kelompok suku. Setiap suku dikepalai oleh seorang kepala suku yang disebut dengan "Ondoafi" dan yang mengepalai beberapa suku disebut "Ondopolo". Komunitas suku tersebut tunduk kepada apa yang dikemukakan oleh kepala sukunya (Ondoafi), dan seorang Ondoafi tunduk kepada Ondopolo. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kelompok separatis GSPB untuk melakukan koordinasi politik di PNG dalam menyusun kekuatan. Perbatasan Papua dikategorikan daerah rawan, karena terdapat kelompok separatis bersenjata yang menggunakan perbatasan sebagai tempat mengatur strategi dan operasi. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan NKRI, TNI menunjuk Kodam XVII/Cenderawasih melakukan pengamanan dengan menempatkan pos Pamtas sebanyak 94 Pos yang digelar disepanjang perbatasan darat Papua.

### 13. Kebijakan dan strategi pengamanan Perbatasan.

#### a. Kebijakan.

1) Kebijakan pemerintah tentang strategi penanganan wilayah perbatasan terutama kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup dua aspek pembangunan, yaitu aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek keamanan (security). Kedua aspek pembangunan tersebut dirinci dalam 3 kebijakan yang meliputi, kebijakan mendukung upaya memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan mendukung upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah yang ada, dan kebijakan mendukung pemantapan keamanan dalam rangka pembinaan serta peningkatan ketahanan wilayah menuju terciptanya ketahanan nasional. Dengan penataan peran satuan pengamanan perbatasan RI-PNG maka akan meningkatkan stabilitas keamanan di daerah perbatasan sehingga mendukung upaya memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2) Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan. Ancaman yang bersumber dari konflik wilayah dan kawasan perbatasan merupakan salah satu ancaman actual untuk ditangani secara lebih serius, oleh sebab itu prioritas kebijakan pertahanan negara diarahkan pada:

- a) Pengintegrasian peran dan fungsi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pengembangan kawasan perbatasan Negara.
- b) Maksimalisasi peran BNPP dalam rangka meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- c) Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pembangunan infrastruktur perbatasan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penuntasan penentuan garis batas dengan negara tetangga, serta mengkoordinasikan penataan ruang kawasan pertahanan dan pengamanan secara fisik bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

d) Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian perbatasan secara damai dengan negara-negara yang memiliki persoalan perbatasan dengan NKRI (Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 2010 tentang kebijakan umum Pertahanan Negara tahun 2010-2014).

b. **Strategi.** Strategi yang diperlukan untuk penataan peran Satgas Pamtas RI-PNG, yaitu mengutamakan azas prioritas dan keseimbangan agar mampu mewujudkan satuan Pamtas RI-PNG yang handal dan mampu berperan mengatasi setiap ancaman yang dapat muncul setiap saat di perbatasan.

#### 14. **Tugas Pamtas Kodam XVII/ Cendrawasih**

##### a. **Koops Pamtas RI-PNG.**

- 1) Melaksanakan tugas dalam rangka pemeliharaan stabilitas keamanan, peningkatan kewibawaan pemerintah dan kelancaran pembangunan di daerah dan wilayah perbatasan
- 2) Merencanakan dan melaksanakan komando dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan operasi pengamanan darat RI-PNG dalam rangka tugas pokok TNI.
- 3) Melaksanakan pengawasan secara terus menerus di wilayah perbatasan dengan memberikan tanda batas wilayah yang jelas berupa monumen, menara, bendera maupun tanda lainnya.
- 4) Mempertimbangkan penambahan personil dan satuan Kowil pada tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap kemungkinan penyerobotan batas wilayah.
- 5) Melakukan koordinasi tentang pengamanan perbatasan dengan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman.
- 6) Mensosialisasikan patok-patok batas negara .yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (Status Quo).
- 7) Membantu instansi terkait (Poiri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan RI - PNG.

- 8) Menambah peralatan/persenjataan maupun sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi/GPS/telepon satelit sebagai penunjang pengawasan wilayah perbatasan.
- 9) Menyelaraskan kegiatan Binter di wilayah perbatasan dengan pendekatan merapatkan diri dengan desa-desa di perbatasan.
- 10) Menajamkan prioritas rencana pembangunan pos perbatasan permanen secara bertahap.
- 11) Mengaplikasikan konsep Binter khas Papua melalui Lemdik, dan Pendidikan Dasar Bela Negara.
- 12) Melaksanakan Binter di wilayah perbatasan RI-PNG.

b. **Kolakops Pamtas RI - PNG.** Melaksanakan tugas Koops Pamtas RI-PNG di wilayah perbatasan meliputi :

- 1) Mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan (lintas batas) disepanjang perbatasan darat RI - PNG.
- 2) Mencegah penyelundupan dan pasar gelap di sepanjang perbatasan darat RI - PNG.
- 3) Mengkoordinasikan/kerjasama tentang pengamanan perbatasan dengan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF)
- 4) Mensosialisasikan patok-patok batas negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (Status Quo).
- 5) Membantu instansi terkait (Poiri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam menegakkan hukum di wilayah perbatasan RI - PNG.
- 6) Melaksanakan Binter di wilayah perbatasan khususnya terhadap para mantan anggota OPM di wilayahnya.
- 7) Mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan sebagai tempat kegiatan illegal.

c. **Satgas Pamtas.** Melaksanakan tugas sebagai pasukan pengaman perbatasan Kolakops Pamtas RI -PNG di wilayah perbatasan meliputi :

- 1) Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk apapun disepanjang perbatasan darat RI- PNG.

- 2) Mencegah kegiatan penyelundupan bahan-bahan yang disubsidi oleh pemerintah RI dan barang-barang lainnya yang dilarang sesuai ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI -PNG.
- 3) Mengkoordinasikan kerjasama pengamanan perbatasan dengan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman.
- 4) Melaksanakan sosialisasi batas wilayah/patok-patok batas antar negara terhadap masyarakat di wilayah perbatasan dan mengawasi daerah yang masih bermasalah.
- 5) Membantu instansi terkait (Poiri, Bea Cukai, dan Imigrasi) dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan RI - PNG.
- 6) Melaksanakan Binter dengan membina dan meningkatkan pemahaman tentang batas wilayah melalui kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah perbatasan, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan terhadap Satgas pamtas untuk menyerahkan Jatmuhandak secara sukarela.
- 7) Mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

15. **Kekuatan yang dilibatkan : 3.335 Org terdiri dari :**

a.	Koops TNI Papua	100	orang
b.	Kolakops 172/PWY	70	orang
c.	Satgas Yonif 713/ST	704	orang
d.	Satgas Yonif 527/BY	704	orang
e.	Unsur Kodim 1701/JPR	24	orang
f.	Unsur Kodim 1702/JWY	24	orang
g.	Kolakops 174/ATW	70	orang
h.	Satgas Yonif 433/K	704	orang
i.	Satgas Yonif 753/AVT	704	orang
j.	Unsur Kodim 1707/MRK	23	orang
k.	Unsur Kodim 1711/BVD	23	orang
l.	Satgas Intel	140	orang
m.	Satgasud	40	orang
n.	Den Penerbad	25	orang

16. **Kondisi Gelar Satgas Pamtas RI-PNG.** Sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG, di Papua telah digelar kekuatan TNI-AD sebagai komponen utama, baik satuan organik maupun satuan non organik yang di BKO-kan ke Kodam XVII/Cenderawasih selaku Komando Operasi Papua, yang direalisasikan dengan menggelar pos-pos Pamtas di sepanjang daerah perbatasan. Dalam kenyataannya, kekuatan satuan yang tergelar di perbatasan belum mampu menjaga wilayah perbatasan dari berbagai permasalahan yang dapat mengancam kedaulatan negara, karena penataan gelar Satgas Pamtas belum dapat berperan secara efektif dan efisien dalam mengamankan wilayah perbatasan. Dari segi kualitas maupun kuantitas kondisi gelar satuan Pamtas RI-PNG masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari aspek kekuatan dan aspek gelar kekuatan.

a. **Aspek Kekuatan.**

1) **Personel.** Personel yang bertugas di wilayah perbatasan RI-PNG adalah personel yang berasal dari satuan non organik maupun organik Kodam XVII/Cenderawasih, ditugaskan sebagai satuan tugas pengamanan dan menempati pos-pos perbatasan RI-PNG di Papua. Untuk mengamankan wilayah perbatasan, Kodam XVII/Cenderawasih selaku Komando Operasi Papua telah menggelar kekuatan yang terdiri dari 2 (dua) Korem selaku Kolakops (Korem 172/PVY dan Korem 174/ATW) membawahi 4 (empat) Satgas Pamtas, dengan personel sebanyak 2.816 orang. Kekuatan masing-masing Satgas Pamtas berjumlah 704 orang prajurit dengan jumlah Pos sebanyak 23 dan 24 Pos Pamtas. Apabila dihadapkan pada panjang wilayah perbatasan RI-PNG ( $\pm$  780 Km), maka kekuatan Satgas Pamtas masih jauh dari mencukupi dalam mengamankan wilayah perbatasan RI-PNG.

2) **Materiil.** Materiil yang digunakan Satgas Pamtas RI-PNG dalam mendukung pelaksanaan tugasnya menggunakan materiil berupa alat komunikasi, alat angkut darat (truk dan ambulance), alat angkut udara (helikopter), alat penjernih air dan alat penginderaan malam.

a) **Alat Komunikasi.** Untuk mendukung kelancaran operasional Satgas Pamtas RI-PNG dibutuhkan alat komunikasi. Alat komunikasi yang tersedia di masing-masing pos Satgas Pamtas terdiri dari Radio SSB, HT dan PRC 1077.

Penggunaan alat komunikasi tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah di sepanjang pos perbatasan, hal ini dikarenakan kondisi hutan yang lebat dan pegunungan yang tinggi serta kondisi alat komunikasi yang mulai tidak dapat digunakan dihadapkan dengan keadaan di lapangan. Repiter yang sudah tergelar di sepanjang daerah perbatasan belum mampu menjangkau semua pos. Tiap Satgas hanya dibekali 1 (satu) unit telepon satelit sehingga tidak mencukupi untuk digunakan bila tiap pos melaksanakan patroli dalam rangka pengecekan patok dan pengamanan.

b) Alat Angkut Darat. Alat angkut darat yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan operasi berupa kendaraan Truk dan mobil ambulance. Saat ini tiap Satgas hanya memiliki 4 unit truk dan 1 unit Ambulance. Bila dihadapkan dengan jumlah Pos yang tergelar di perbatasan, jumlah tersebut belum mampu mendukung secara maksimal pelaksanaan operasi Satgas Pamtas RI-PNG.

c) Alat Angkut Udara (Helikopter). Untuk mendukung kegiatan operasi yang tidak dapat dilakukan dengan kendaraan ke pos-pos jajaran Satgas PamtasRI-PNG, maka digunakan pesawat Helikopter. Jumlah pesawat Helikopter yang disiapkan untuk mendukung operasi Satgas Pamtas RI-PNG saat ini berjumlah 2 unit dan sering mengalami gangguan teknis/rusak. Kondisi ini menghambat kegiatan pendorongan logistik, pergeseran pasukan dan evakuasi prajurit khususnya yang berada di pos-pos yang sulit dijangkau dengan transportasi darat.

d) Alat Penjernih Air. Kondisi air yang terdapat di sekitar Pos Pamtas RI-PNG kondisinya tidak layak diminum dikarenakan mengandung kapur dan berbau belerang, sehingga untuk memasak dan minum, para prajurit menggunakan air hujan. Mengatasi permasalahan tersebut, setiap Satgas Pamtas dibekali alat penjernih air sejumlah 40 unit, namun masih kurang mencukupi untuk semua Pos.

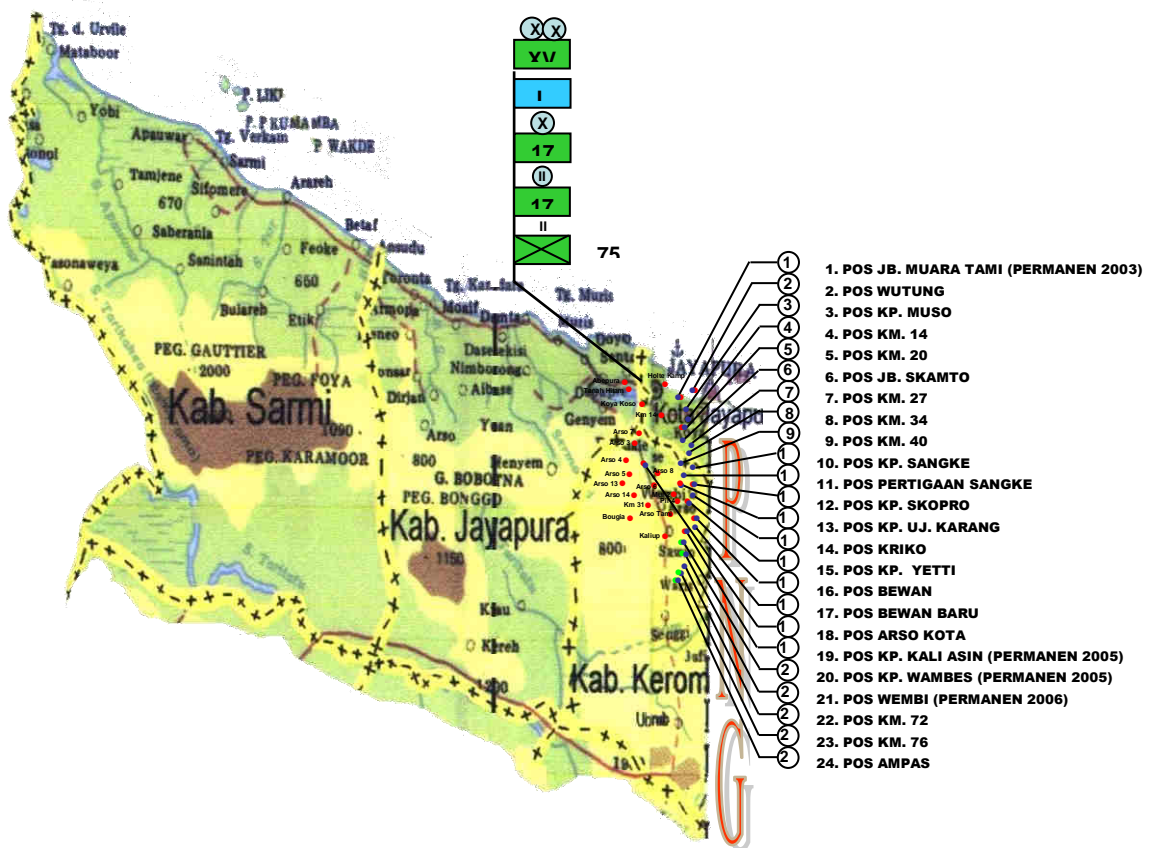
5) Alat Penginderaan malam atau Night Vision Goggle (NVG). Merupakan alat penginderaan malam yang sangat bermanfaat bagi prajurit Satgas Pamtas dalam penugasan. NVG yang dimiliki oleh Satgas Pamtas jumlahnya terbatas, tiap Satgas Pamtas hanya dibekali dengan 4 buah NVG, sehingga tidak mencukupi untuk digunakan oleh tiap pos.

b. **Aspek Gelar Kekuatan.** Pos-pos perbatasan yang berada di sepanjang perbatasan RI-PNG saat ini berjumlah 94 pos. Bila dihadapkan dengan panjang garis perbatasan yakni 780 Km, yang terdiri atas batas darat kurang lebih 663 Km dan Sungai Fly sepanjang 117 Km, maka jumlah pos perbatasan yang telah digelar belum mencukupi dalam mengamankan dan menjaga perbatasan.

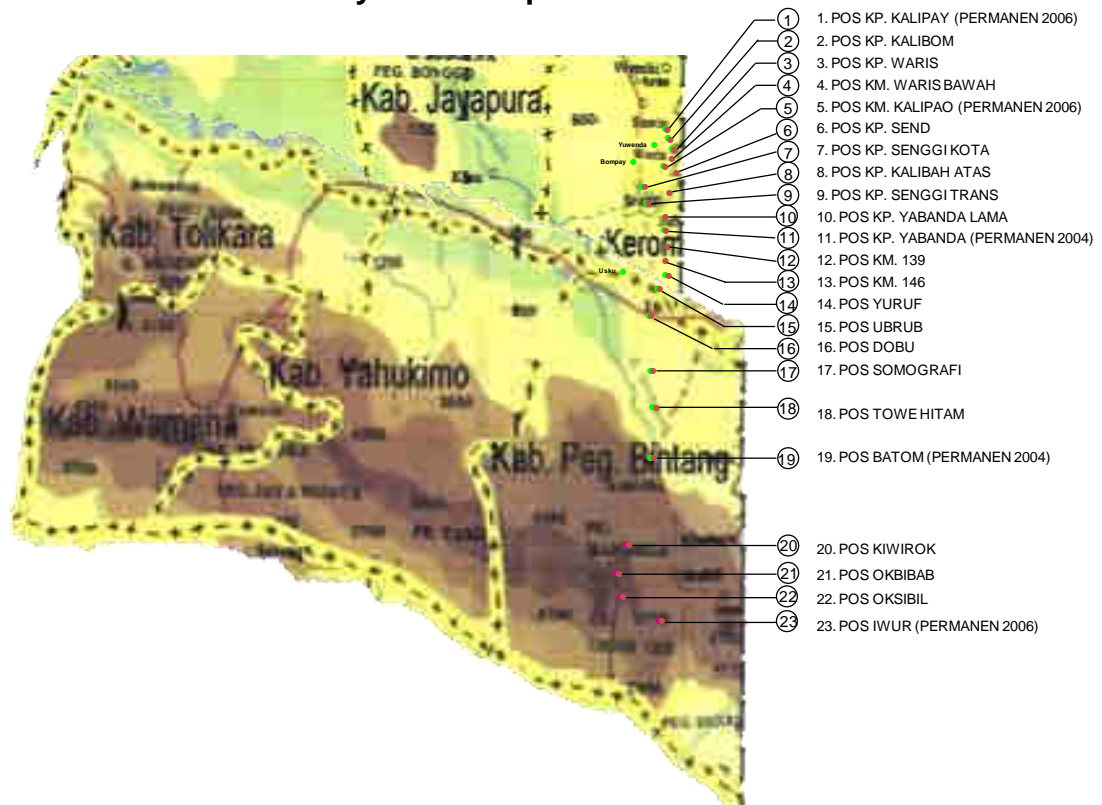
1) Gelar kekuatan Pamtas di Kolakopsrem 172/PVY. Di wilayah Kolakopsrem 172/PVY saat ini terdapat 2 Satgas Pamtas yang melaksanakan operasi Pamtas RI-PNG, dimana masing-masing Satgas menempati 23 dan 24 pos Pamtas atau bisa dikatakan jumlah pos yang tergelar wilayah Kolakopsrem 172/PVY berjumlah 47 pos. Bila dihadapkan dengan panjang perbatasan  $\pm$  390 Km maka akan terdapat daerah –daerah yang tidak dapat terawasi oleh pos-pos Satgas Pamtas. Jarak pos Pamtas ke perbatasan masih relatif jauh sehingga tidak efektif dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pos yang terjauh jaraknya 37 Km dari perbatasan RI-PNG yaitu pos Km 31 dan pos Skamto. Akibatnya kondisi keamanan daerah perbatasan, rawan terhadap kegiatan infiltrasi pihak lawan, penyelundupan senjata, aksi penyerangan terhadap pos oleh GSPB dan kegiatan ilegal lainnya. Aksi-aksi yang dilancarkan oleh GSPB dilakukan dari wilayah perbatasan RI-PNG yang dikenal dengan “no mans land” sebagai tempat membangun basis-basis untuk melancarkan aksi-aksi penyerangan ke pos-pos Pamtas melalui jalan-jalan pendekat yang tidak dijaga oleh pos-pos TNI, untuk menunjukkan eksistensinya ke dunia internasional. Kegiatan penyelundupan senjata dari PNG ke wilayah Indonesia yang dilakukan oleh kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam mendukung GSPB dan simpatisannya. Kondisi ini terlihat dengan banyaknya senjata yang beredar secara bebas di PNG. Pengawasan terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan

tersebut menjadi tidak dapat dilakukan sesuai harapan dikarenakan jarak antar pos dan jarak pos ke perbatasan relatif jauh sehingga menyulitkan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal, aksi-aksi GSPB dan pengawasan patok pilar batas atau Meridians Monument (MM). Kondisi ini diperparah dengan masih minimnya sarana prasarana dan kurangnya pemeliharaan pos sehingga banyak pos perbatasan yang kondisinya sudah tidak layak huni, terutama pos yang semi permanen sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas secara optimal dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan. Beberapa pos yang sudah tidak layak huni, dikarenakan berada di lereng perbukitan sehingga rawan terkena longsor pada saat hujan lebat dan masih ada pos Pamtas yang letaknya berada di tepi sungai (Sungai Bewan), apabila sungai meluap maka pos tersebut tergenang air.

**Gambar 3.2**  
**Gelar Pos Pamtas Yonif 713/ST (24 Pos)**  
**di wilayah Kolakopsrem 172/PVY**

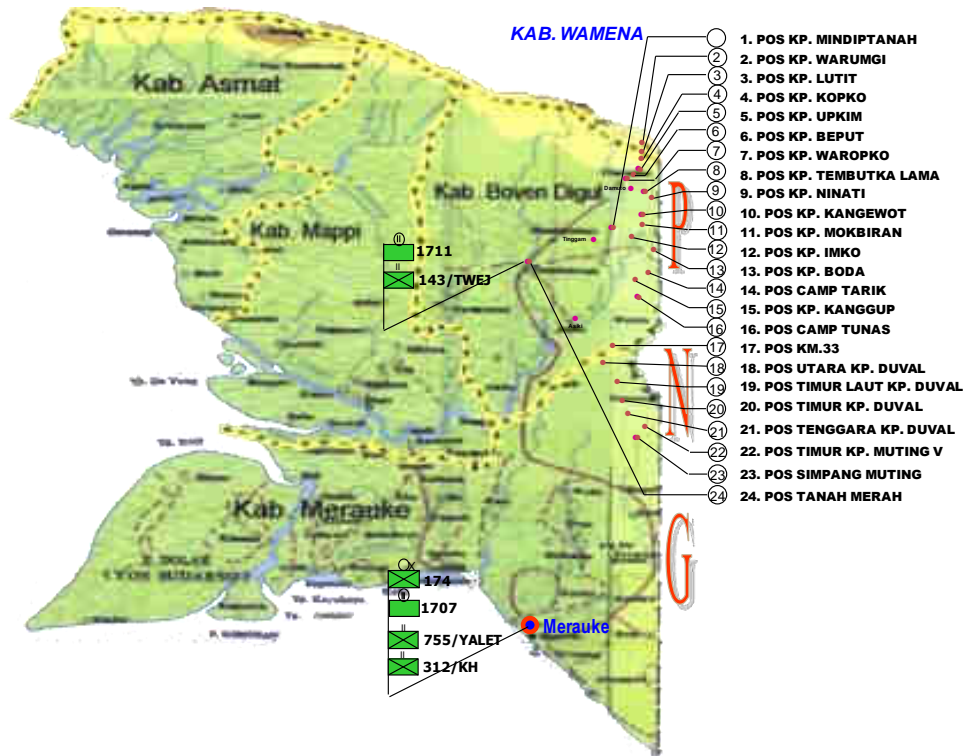


**Gambar 3.3**  
**Peta Dislokasi Satgas Yonif 527/BY (23 Pos)**  
**di wilayah Kolakopsrem 172/PVY**

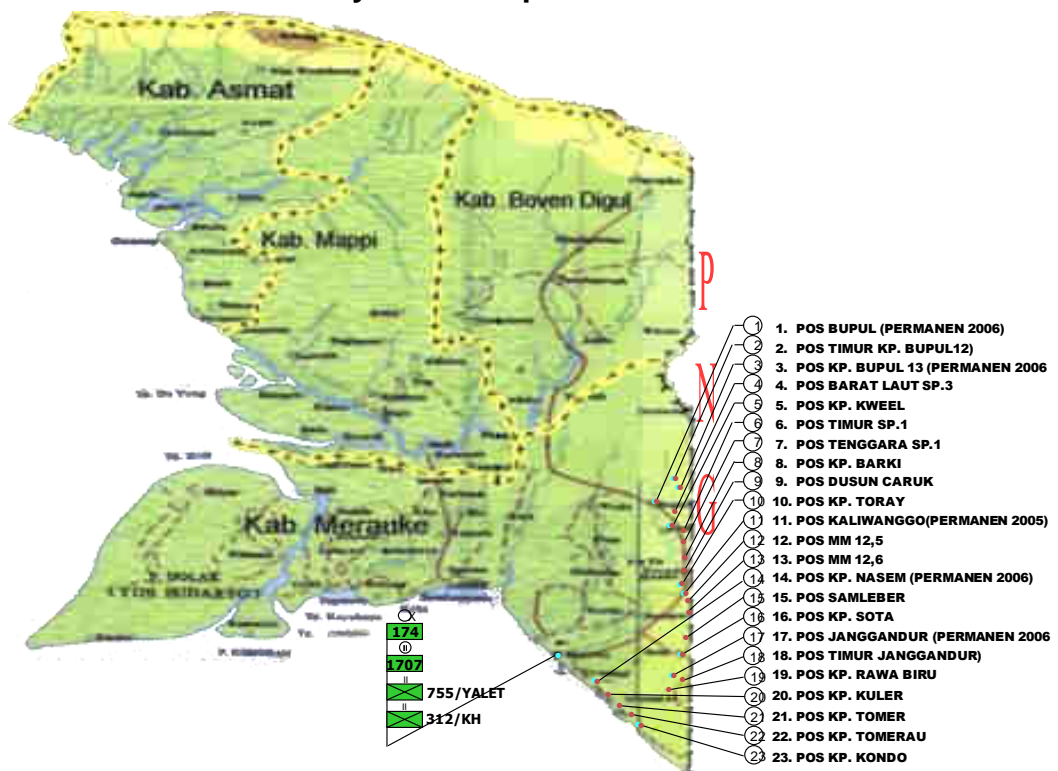


- 2) Gelar Kekuatan Pamtas di wilayah Kolakopsrem 174/ATW. Kondisi gelar kekuatan Pamtas di wilayah Kolakopsrem 174/ATW hampir sama dengan gelar kekuatan Pamtas di wilayah Kolakopsrem 172/PVY. Di wilayah Kolakopsrem 174/ATW terdapat 2 Satgas Pamtas yang melaksanakan operasi Pamtas RI-PNG, dimana masing-masing Satgas menempati 23 dan 24 pos Pamtas. Bila dihadapkan dengan panjang perbatasan  $\pm 390$  Km, maka akan terdapat daerah-daerah yang tidak dapat diawasi oleh Pos-pos Pamtas. Jarak pos Pamtas ke perbatasan juga masih relatif jauh sehingga tidak efektif dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pos yang terjauh jaraknya  $\pm 29$  Km dari perbatasan RI-PNG, yaitu pos Kalimantan dan Pos Kp. Duval. Akibatnya kondisi keamanan daerah perbatasan di wilayah Kolakopsrem 174/ATW juga rawan terhadap kegiatan infiltrasi pihak lawan, penyelundupan senjata, aksi penyerangan GSPB terhadap pos-pos TNI yang terpencil dan kegiatan ilegal lainnya.

**Gambar 3.4**  
**Gelar Pos Pamtas Yonif 433/JS (24 pos)**  
**di wilayah Kolakops Rem 174/ATW**



**Gambar 3.5**  
**Peta Dislokasi Satgas Yonif 753/AVT (23 Pos)**  
**di wilayah Kolakops Rem 174/ATW**



17. **Kondisi kerjasama Indonesia-PNG.** Hubungan Indonesia dengan Negara tetangga PNG diwarnai pada aspek kerjasama di perbatasan dalam rangka menjamin keamanan wilayah perbatasan RI-PNG. Hal ini menjadi prioritas karena adanya aktifitas kelompok GSPB yang memanfaatkan daerah perbatasan RI-PNG sebagai daerah penyelaman dan basis operasi separatis. Untuk menjamin stabilitas keamanan wilayah di perbatasan RI-PNG, maka pemerintah RI telah menjalin kerjasama dengan pemerintah PNG dengan membentuk suatu lembaga yang menangani masalah perbatasan RI-PNG berupa Joint Border Committee (JBC) yang tertuang dalam MOU on the Establishment of the joint Border Committee dan ditandatangani di Port Moresby (PNG) pada tanggal 4 Agustus 1982 dan diratifikasi pada tanggal 15 Nopember 1993 di Rabaul (PNG). Joint Border Committee (JBC) atau komite bersama perbatasan merupakan forum antar pemerintah untuk menampung dan menyelesaikan seluruh masalah yang belum terselesaikan dalam forum Sub Komite, mengadakan pertemuan sekali dalam setahun dengan tempat saling bergantung Komite dalam JBC adalah Joint technical Sub Committee on Security Matter along to the Common Border Area (JSCS) atau Sub Komite Teknis tentang keamanan di sepanjang perbatasan diketuai oleh Wakil Asisten Operasi Kasum TNI. Kerjasama yang telah dijalin oleh TNI dengan tantara PNG diantaranya : **Membangun pilar batas.** Pemetaan wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Australia sebagai protektorat PNG, di sepanjang garis batas/ Meridian Monumen mulai dari Utara s.d Selatan sepanjang 780 Km, telah dibangun 52 pilar batas negara yang terdiri dari 24 pilar batas merupakan tanggungjawab pemeliharaan RI dan 28 pilar batas tanggungjawab pemeliharaan PNG. Dari 24 pilar batas yang menjadi tanggungjawab Indonesia terdapat 10 pilar batas terletak di bagian Utara dan 14 pilar batas terletak di bagian Selatan, sementara 28 pilar batas yang menjadi tanggungjawab PNG berada di sektor Tengah. Kedudukan Pos Pamantas dengan letak Pilar batas kebanyakan jaraknya cukup jauh sehingga untuk pemeliharaan pilar batas, maka Pos melaksanakan patroli secara rutin.

18. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Pamantas.** Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia dan PNG tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, baik faktor yang berasal dari dalam lingkungan organisasi TNI AD maupun dari luar organisasi TNI AD. Oleh karena itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas sesuai peran satuan Pamantas perlu diuraikan sebagai berikut:

a **Faktor Internal.**

1) Kekuatan.

a) Pada umumnya prajurit organik Kodam XVII/Cend yang pernah melaksanakan operasi Pamtas RI-PNG mampu beradaptasi dengan lingkungannya, karena lebih mengenal kondisi daerah dan adat istiadat masyarakat di perbatasan, sehingga keberadaan mereka lebih mudah diterima masyarakat. Kondisi ini akan mendukung gelar kekuatan Satgas Pamtas di sepanjang perbatasan apabila prajuritnya berasal dari satuan jajaran Kodam XVII/Cend.

b) Pengembangan personel TNI AD dilakukan dengan pengadaan personel melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, baik perorangan maupun satuan. Pemantapan kekuatan TNI AD dilakukan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung. Dihadapkan dengan gelar kekuatan Pamtas yang dikembangkan maka tidak akan terdapat kendala yang berarti dalam pengadaan personel yang diperlukan.

c) Sebelum melaksanakan tugas operasi RI-PNG, para prajurit Satgas Pamtas telah diberikan pembekalan dan latihan pratugas selama 7 minggu, dengan materi latihan disesuaikan dengan kebutuhan operasi, seperti latihan taktik tingkat perorangan dan satuan, latihan menembak, pembinaan territorial terbatas, test psikologi dan pembekalan lainnya. Selanjutnya satuan atas melaksanakan asistensi, penilaian dan pengecekan mulai dari tingkat Kotama sampai dengan Mabes TNI. Sehingga kemampuan setiap prajurit Satgas Pamtas secara umum telah memenuhi syarat untuk melaksanakan operasi.

2) Kelemahan.

a) Minimnya alat peralatan seperti kendaraan bermotor dan peralatan pendukung patroli NVG yang dimiliki oleh satuan TNI AD, sangat menghambat pelaksanaan tugas

operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-PNG. Keterbatasan ini akan menjadi kelemahan bagi pelaksanaan tugas Pamtas di daerah perbatasan RI-PNG di Papua dihadapkan dengan kondisi medan yang cukup berat.

b) Tingginya jumlah penderita malaria tropika di daerah perbatasan yang berdampak langsung kepada prajurit di lapangan, serta lambatnya penanganan masalah tersebut sehingga menyebabkan adanya prajurit meninggal dunia, hal ini dapat menurunkan moril prajurit dalam bertugas di perbatasan RI-PNG di Papua.

c) Sebagian prajurit Satgas Pamtas RI-PNG yang BKO kepada Kodam XVII/Cend kurang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan, khususnya dalam menjunjung adat istiadat masyarakat di daerah perbatasan RI-PNG. Beberapa diantara mereka beranggapan bahwa mereka bertugas hanya 1 (satu) tahun, sehingga kurang dapat beradaptasi dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dampak dari kejadian tersebut, apabila terjadi kesalahpahaman antara prajurit dengan masyarakat, dapat dipolitisir oleh kelompok GSPB dan simpatisannya yang tidak senang dengan kehadiran TNI AD yang mengamankan perbatasan RI-PNG. Bila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, keadaan ini dapat merusak citra TNI AD khususnya Satgas Pamtas RI-PNG sehingga pelaksanaan tugas Pamtas kurang didukung masyarakat sehingga hasilnya kurang maksimal.

**b. Faktor Eksternal.**

**1) Peluang.**

a) Doktrin pertahanan negara yang dianut oleh bangsa Indonesia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya dalam system pertahanan semesta. Dalam penyelenggaraannya dilakukan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Hal ini merupakan landasan yang kuat bagi TNI AD untuk melakukan penataan TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan. Memberikan peluang bagi TNI AD untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran Satgas Pamtas RI-PNG di Papua dalam menjaga kedaulatan Negara.

b) Pembentukan badan otorita wilayah perbatasan sebagai badan yang berwenang mengendalikan dan mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi di perbatasan, meliputi masalah ekonomi, pertahanan dan keamanan. Gelar kekuatan Satgas Pamtas RI-PNG saat ini bila dikaitkan dengan pembentukan badan otorita yang menangani wilayah perbatasan, perlu adanya kerjasama tugas yang bersinergi dengan berbagai badan yang dibentuk mengelola daerah perbatasan. Peningkatan stabilitas keamanan sepanjang perbatasan akan memacu pembangunan di sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di sepanjang perbatasan.

## 2) Kendala.

a) Secara geografis daerah perbatasan RI-PNG terdiri dari daerah dataran rendah yang berawa-rawa, daerah pegunungan dan hutan lebat. Kondisi geografis tersebut membutuhkan ketersediaan sarana jalan penghubung yang cukup banyak. Namun dihadapkan dengan keterbatasan jalan penghubung, sarana komunikasi dan transportasi di daerah perbatasan, maka pelaksanaan operasi Pamtas RI-PNG tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

b) Maraknya aksi separatisme dan gangguan keamanan lainnya di wilayah perbatasan, seperti kasus penyelundupan, pencurian kayu, imigran gelap dan pelintas batas mengakibatkan konsentrasi tugas satuan TNI AD terbagi-bagi. Hal ini menjadi kendala bagi pimpinan TNI untuk melakukan penataan peran Satgas Pamtas RI-PNG di daerah perbatasan Papua.

- c) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait tentang penanganan masalah perbatasan menyebabkan pengamanan wilayah perbatasan belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu. Hal ini sering ditemukan di lapangan, dimana masing-masing instansi masih terlihat bekerja secara sendiri-sendiri dan kurang saling mendukung. Sering terjadi saling tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak yang bertugas di perbatasan RI-PNG di Papua sehingga berbagai permasalahan lintas batas belum diselesaikan secara terpadu.
- d) Terbatasnya dana dan anggaran bagi TNI AD yang dialokasikan dalam APBN untuk mendukung pengembangan dan pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan Papua, sehingga menghambat pengoperasian Satgas Pamtas dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan RI-PNG di Papua.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

19. **Umum.** Direktif Panglima TNI tentang pengamanan wilayah perbatasan menyebutkan bahwa Satgas Pamtas dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan RI-PNG, bertugas antara lain: pertama, menciptakan stabilitas keamanan di perbatasan; Kedua, mengamankan pilar patok batas negara yang terdapat di sepanjang garis batas negara; ketiga, mencegah segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi di perbatasan; dan keempat, mencegah keluar masuknya kelompok GSPB melalui perbatasan. Kondisi Satgas Pamtas dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan RI-PNG dapat dilihat dari hasil pengumpulan informasi di lapangan, baik dari hasil pengumpulan cheklis yang disebar kepada seluruh responden, hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kebenaran jawaban responden maupun hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Oleh karena itu semua data yang ditemukan di lapangan perlu dianalisis terhadap peran Satgaspamtas dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan Papua.

#### 20. **Analisis Kondisi Pengamanan Perbatasan.**

##### a. **Gelar dan kekuatan Satgaspamtas.**

##### 1) Dihadapkan dengan aspek kekuatan.

a) **Personel.** Personel Pamtas yang bertugas di perbatasan RI-PNG menggunakan satuan non organik maupun satuan organik Kodam XVII/Cend, diharapkan dapat lebih mengenal daerah operasi dan adat istiadat masyarakat di perbatasan. Kekuatan personel yang digelar diharapkan dapat mengawasi wilayah perbatasan RI-PNG sepanjang  $\pm$  780 Km dengan menyiapkan satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas. Untuk memenuhi kebutuhan personel Pamtas disiapkan dengan :

(1) Melaksanakan perekrutan personel BA/TA dari hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh Rindam dengan memprioritaskan penerimaan putra daerah yang sudah mengenal budaya daerah Papua dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

(2) Memanfaatkan personel satuan lain yang melebihi TOP untuk melengkapi personel satuan yang disiapkan melaksanakan operasi di perbatasan Papua, dengan mengajukan kekurangan personel ke Komando Atas.

b) Materiil. Materiil yang digunakan Satgaspamtas RI-PNG diharapkan, dapat mendukung pelaksanaan tugas Pamtas didukung alat peralatan yang memenuhi standar kebutuhan satuan di daerah operasi, antara lain:

(1) Alat Komunikasi. Satuan yang melaksanakan operasi Pamtas diharapkan setiap Pos dibekali telepon satelit untuk mendukung pelaksanaan patroli pengawasan. Hal ini diperlukan karena kondisi medan di daerah perbatasan berada di daerah pegunungan serta keadaan cuaca yang tidak menentu, sehingga diperlukan alat komunikasi berupa repiter dan telepon satelit.

(2) Alat Angkut Darat. Kendaraan Truk yang tersedia di masing-masing Satgas diharapkan dapat mendukung Pos-Pos Pamtas dalam melaksanakan patroli dan pendistribusian logistik pasukan. Untuk kelancaran evakuasi korban di daerah operasi dibutuhkan Ambulance yang siap operasional setiap saat. Dengan demikian setiap Satgas dibutuhkan ketersediaan truk dan ambulance dalam melayani pasukan yang digelar di tiap-tiap Pos.

(3) Alat Angkut Udara (Helikopter). Untuk mendukung kelancaran evakuasi, pendistribusian logistik dan patroli kedaerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat, dibutuhkan alat angkut udara berupa pesawat Helikopter. Untuk mendukung kelancaran operasi Satgaspamtas, maka disetiap Kolakopsrem perlu disiapkan satuan Helikopter yang dapat mendukung Satgaspamtas yang memerlukan penanganan secara cepat.

(4) Alat penjernih air. Mengatasi sulitnya memperoleh air bersih di daerah operasi, diharapkan setiap Pos dibekali alat penjernih air yang dapat digunakan Pos untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

(5) Night Vision Goggle (NVG). Untuk mendukung operasi Pamtas pada malam hari, di setiap Pos diharapkan tersedia NVG sebagai perlengkapan khusus untuk membantu prajurit saat melaksanakan operasi pada malam hari.

2) Dihadapkan dengan aspek gelar Satgaspamtas. Perbatasan RI-PNG berada di wilayah Kolakopsrem 172/PVY melintasi wilayah Kodim 1701/Jayapura dan Kodim 1702/Jayawijaya, wilayah Kolakopsrem 174/ATW melintasi wilayah Kodim 1707/Merauke dan Kodim 1711/Bouvendigul, sepanjang  $\pm$  780 Km. Untuk menutup celah masuknya pelintas batas illegal, aksi GSPB dan penyelundupan, perlu penataan gelar Pos yang dapat menjaga sepanjang wilayah perbatasan. Pos-Pos yang masih jauh dari pilar batas (MM), perlu dipindahkan sedekat mungkin dengan pilar batas negara sehingga dapat menutup celah masuknya pelintas batas secara illegal. Pergeseran Pos perlu dilaksanakan untuk mempermudah pengawasan dan kegiatan patroli dapat dilaksanakan secara rutin dengan jarak tidak terlalu jauh. Sepanjang perbatasan RI-PNG digelar 4 (empat) Satgas, dengan masing-masing Satgas menambah 1 (satu) Pos Kout dari 23 atau 24 Pos Pamtas. Untuk mengefektifkan peran Satgaspamtas perlu penataan gelar pos, antara lain:

a) Gelar Pos Kout.

(1) Ditinjau dari Kodal, penempatan Pos Kout dicari lokasi yang memudahkan pengendalian bagi Pos-Pos Pamtas yang di gelar sepanjang perbatasan dan dapat berhubungan dengan Komando Atas. Alkom yang terdapat disatuan harus dapat digelar di Pos Kout sehingga dapat melaksanakan Kodal terhadap semua aktifitas pasukan yang berada di masing-masing Pos.

Seperti pengendalian patroli pengecekan patok, patroli pengamanan, kegiatan Binter terbatas dan pengawasan terhadap pelintas batas.

(2) Ditinjau dari gelar. Penentuan letak Pos Kout diharapkan memenuhi syarat-syarat memberikan pelayanan untuk mendukung kebutuhan operasi yang diperlukan Pos-Pos yang berada di bawah jajarannya, dengan sistem pelayanan distribusi satuan. Apabila pelayanan administrasi logistik tidak dapat menjangkau Pos dengan alat transportasi darat, maka dilaksanakan pelayanan dengan sistem titik distribusi.

(3) Ditinjau dari segi taktik dan administrasi. Penentuan letak Pos Kout harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Terdapat jalan pendekat yang dapat menghubungkan Pos Kout dengan pos-pos yang berada di bawah jajarannya, sehingga memudahkan pelayanan dan pengendalian lapangan.
- (b) Pos Kout berada pada medan kritis sehingga dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lama dari ancaman serangan kelompok GSPB, dan tidak terdapat medan yang lebih dominan di sekitar Pos Kout.
- (c) Sekitar Pos Kout dekat dengan sumber air untuk keperluan masak dan MCK, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari prajurit yang berada di Pos.
- (d) Terdapat jalan keluar masuk kendaraan untuk pergeseran pasukan, evakuasi dan pendorongan logistik.
- (e) Terdapat lapangan Heliped untuk pendaratan Helikopter, disiapkan di daerah yang aman, medan cukup luas, relatif datar, bebas dari pepohonan yang tinggi dan dekat dengan Pos Kout.

(f) Letak Pos Kout berada di tengah-tengah sektor wilayah tanggung jawab Satgas, untuk memudahkan pengawasan terhadap aktifitas pos-pos yang berada di bawah jajarannya.

b) Gelar Pos Pamtas.

(1) Ditinjau dari Kodal. Penempatan Pos Pamtas berada di lokasi yang dapat memudahkan para Danpos mengendalikan kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh anggotanya. Alkom yang digelar dapat berkomunikasi dari Pos dengan pos lainnya, pos dengan anggota yang sedang patroli maupun dari pos dengan Pos Kout.

(2) Ditinjau dari Gelar. Dislokasi pos-pos Pamtas harus memenuhi syarat untuk mengamankan wilayah perbatasan dari kemungkinan datangnya ancaman dari PNG. Seyogianya jarak antar pos dengan pos lainnya dan pos dengan garis batas negara relatif dekat untuk memudahkan pengawasan.

(3) Ditinjau dari segi Taktis dan Administrasi. Penempatan lokasi pos Pamtas memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Dapat mengawasi jalan pendekat yang digunakan kelompok GSPB yang melaksanakan infiltrasi dari PNG ke wilayah Papua. Dengan ditutupnya jalur pelintasan kelompok GSPB, akan meminimalisir aksi GSPB yang dapat merugikan masyarakat, TNI dan Polri dalam menjaga wilayah perbatasan.

(b) Terdapat jalan pendekat bagi pelintas batas sehingga mudah mengawasi setiap pelintas batas. Bagi masyarakat pelintas batas tradisional yang sering menggunakan jalan tikus untuk aktifitas kehidupan sehari-hari seperti berkebun dan bertani, hendaknya diberlakukan sistem wajib lapor ke pos guna menghindari

terjadinya salah tangkap pada saat Pos mengadakan patroli pengawasan di perbatasan.

(c) Berada pada medan kritis sehingga dapat dipertahankan dalam waktu relatif lama, dengan tidak terdapat medan yang lebih dominan di sekitar pos. Bila tidak ada lokasi pos yang ideal, maka disekitar pos dibuat tanggul-tanggul perlindungan yang dapat melindungi prajurit dari tembakan lintas datar maupun lintas lengkung.

(d) Terdapat sumber air atau dekat dengan sumber air untuk mendukung kegiatan masak dan MCK bagi prajurit yang berada di pos.

(e) Terdapat jalan keluar masuk kendaraan untuk kegiatan pergeseran pasukan, evakuasi dan pendorongan logistik. Bila kendaraan tidak dapat masuk ke sekitar pos dalam melaksanakan kegiatan administrasi, maka ditentukan suatu tempat yang dekat dengan pos sebagai titik distribusi.

(f) Terdapat 1 (satu) lapangan untuk pendaratan Helikopter yang disiapkan di daerah yang aman, cukup luas, relatif datar, bebas dari pepohonan yang tinggi dan dekat dengan Pos

b. **Kerjasama Indonesia PNG.** Permasalahan antar negara bertetangga yang terjadi di daerah perbatasan, dapat diselesaikan oleh kedua negara melalui suatu lembaga bersama yaitu Joint Border Comittee (JBC) yang merupakan forum antar pemerintah untuk menampung dan menyelesaikan seluruh masalah yang belum terselesaikan dalam Forum Sub Komite, dengan mengadakan pertemuan sekali dalam setahun secara bergantian di kedua negara. Bila terjadi permasalahan keamanan di daerah perbatasan RI-PNG, diselesaikan melalui Forum Sub Komite dalam JBC yaitu Joint Technical Sub Committee on Security Matters along to the Common Border Area (JSCS) atau Sub Komite Teknis tentang keamanan.

c. **Organisasi.** Organisasi Satgaspamtas yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG perlu dilakukan dengan menata organisasi Pamtas sesuai peran, fungsi dan tugas Satgas Pamtas yang bertugas di perbatasan

RI-PNG. Merencanakan penambahan jumlah personel Satgaspamtas RI-PNG sehingga mampu mendukung organisasi Satgaspamtas yang digelar di perbatasan RI-PNG di Papua. Merencanakan lama waktu tugas dan penambahan materiil untuk mendukung organisasi Satgaspamtas RI-PNG.

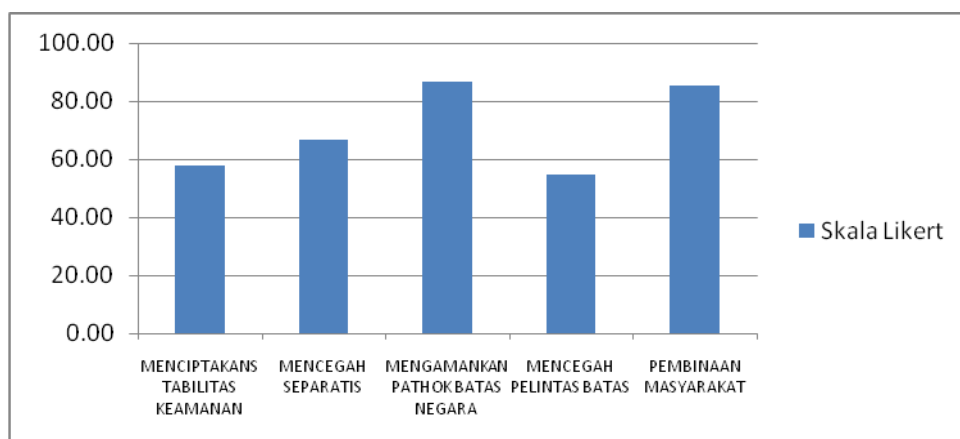
21. **Analisis Peran Satgaspamtas.** Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui sejauh mana peran dari satgas perbatasan dalam rangka tugasnya mengamankan perbatasan maka akan dianalisis melalui skala likert pendapat para responden dan kemudian dilakukan interpretasi dari jawaban mereka, dan dilengkapi atau *cross check* dengan informasi lain yang terkumpul selama survei, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan.

a. **Responsi Pemda.** Berdasarkan perhitungan skala Likert maka untuk setiap kategori responden berhasil dihitung besaran skala Likert untuk setiap kategori pertanyaan sehingga dapat diberikan interpretasi sesuai dengan besaran angka. Gambar 4.1 menunjukkan angka skala Likert untuk kelompok Responden Pemda. Kuesioner pada dasarnya menanyakan seberapa jauh peran Satgas dilihat dari kelima kelompok pertanyaan komponen utama dan kelompok pertanyaan faktor pengaruh. Kelompok pertanyaan komponen utama terdiri dari:

- 1) Menciptakan stabilitas Keamanan
- 2) Mencegah Separatisme
- 3) Mengamankan batas patok Negara
- 4) Mencegah Pelintas Batas
- 5) Pembinaan Masyarakat

**Gambar 4.1**

**Diagram Nilai Skala Likert Pada Responden Pemda**



Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa secara umum kelompok Responden Pemda memandang peran Satgaspamtas penting, dimana hal ini dapat terlihat dari angka skala Likert yang menunjukkan angka rata-rata dari kelima komponen di atas, yaitu sebesar 69.86%. Angka ini tergolong kuat. Angka tertinggi dicapai atau sangat kuat terlihat pada komponen penjagaan patok batas dan pembinaan masyarakat. Pemda memandang peran satgas dalam menjaga patok sudah sangat baik, yang juga menggembirakan adalah Pemda memandang peran satgas dalam ikut membina masyarakat sangat besar (85.36 %). Namun demikian, dari aspek menciptakan stabilitas keamanan dan mencegah pelintas batas, responden Pemda masih menilai baru pada tahap cukup. Diagram berikut menggambarkan komposisi jawaban responden Pemda.

- 1) Hasil wawancara menurut responden Pemda.
  - a) Kelompok pertanyaan menciptakan stabilitas keamanan, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:
    - (1) Kerjasama antar aparat keamanan Satgaspamtas, Satkowil, Polisi, TNI AU dan TNI AL, Nilai tertinggi komponen pada faktor ini berasal dari penilaian terhadap pertanyaan mengenai rencana kedepan tim Satgaspamtas perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi modern dan pengetahuan internasional. Pertanyaan ini memiliki persentase nilai sebesar 93.41 %. Sedangkan nilai komponen terendah berasal dari pertanyaan mengenai pangkalan Asing di Papua bermanfaat positif bagi keamanan perbatasan. Persentase penilaian yang diperoleh untuk pertanyaan ini adalah 56.36 %.
    - (2) Kerjasama antar aparat keamanan dengan Pemda Nilai tertinggi yang diperoleh pada faktor ini berasal dari pertanyaan mengenai pendapat responden mengenai pendapat responden tentang sering terjadi dukungan masyarakat perbatasan terhadap Satgaspamtas. Persentase penilaian untuk pertanyaan tersebut memiliki nilai sebesar 86.15%. Sedangkan nilai terendah diperoleh dari pertanyaan mengenai pendapat

responden tentang penanganan masalah selalu diinformasikan ke Pemda setempat. dengan persentase sebesar 81.54%.

(3) Kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat Nilai tertinggi yang diperoleh pada faktor ini berasal dari pertanyaan mengenai pendapat responden tentang sering terjadinya dukungan masyarakat perbatasan terhadap Satgaspamtas, yaitu sebesar 86.15%. Nilai terendah pada faktor ini diperoleh untuk pertanyaan mengenai pendapat responden tentang sebagian besar masyarakat perbatasan mengetahui pentingnya patok batas negara RI dan PNG, yaitu sebesar 83.74%.

(4) Penegakan disiplin dan penegakan hukum Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya perselisihan/kesalahpahaman antara anggota Satgaspamtas RI dan PNG, dengan persentase nilai sebesar 38.89%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pernah terjadinya perselisihan antara anggota Pamtas dengan Aparat keamanan lainnya, yaitu dengan persentase nilai sebesar 35.28%.

b) Kelompok pertanyaan keamanan wilayah, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Konflik antar etnis Kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya perselisihan antar etnis pendatang dengan penduduk setempat di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 48.35%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang sering terjadinya perselisihan antar umat beragama di daerah perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 35.82%.

(2) Teror (Intimidasi) kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang sering terjadinya ancaman dari GSPB terhadap perusahaan setempat, dengan persentase nilai sebesar 43.08%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya ancaman dari GSPB terhadap masyarakat di perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 40.66%.

(3) Penyelundupan senjata dan muhandak Kelompok faktor ini terdiri dari 6 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya Senpimuhandak yang disita Satgaspamtas di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 55.60%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya penyelundupan senjata ke luar perbatasan RI, yaitu dengan persentase nilai sebesar 36.48%.

c) Kelompok pertanyaan mencegah kegiatan gerakan separatis, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Mencegah kegiatan Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB) Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya perintah terhadap Satgaspamtas untuk mewaspadai gerakan GSPB di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 89.89%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSPB) yang berusaha membuat daerah perbatasan sebagai basis operasi gerakan separatis bersenjata, yaitu dengan persentase nilai sebesar 55.38%.

(2) Mencegah kegiatan Gerakan Separatis Papua Politik (GSPP) Kelompok pertanyaan pada faktor ini terbagi ke dalam 2 bagian yaitu kelompok sub pertanyaan mengenai Infiltrasi politik dan infiltrasi bersenjata. Nilai tertinggi untuk kelompok pertanyaan infiltrasi politik diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya anggota masyarakat yang minta swaka politik kepada negara lain, dengan persentase nilai sebesar 43.33%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya anggota GSPP yang minta dukungan dana kepada negara lain, yaitu dengan persentase nilai sebesar 40.44%. Untuk kelompok sub pertanyaan infiltrasi bersenjata, nilai tertinggi diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya anggota GSPB yang tertangkap menyelundupkan senjata dari luar negeri, dengan persentase nilai sebesar 56.89%. Sedangkan nilai terendah diperoleh dari pertanyaan mengenai sering terjadinya anggota satgaspamtas yang mengetahui sering terjadi penyelundupan senjata di perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 49.89%.

(3) Kegiatan lintas batas kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan b. Menurut sdr, adanya penangkapan terhadap orang yang tidak dilengkapi dengan visa berusaha masuk kewilayah RI, dengan persentase nilai sebesar 74.83%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya pelintas batas tradisional di perbatas RI-PNG tidak dilengkapi dengan visa, yaitu dengan persentase nilai sebesar 63.30%.

d) Mengamankan patok batas negara, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Jumlah patok batas negara kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini

diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas melaksanakan patroli secara rutin untuk mengecek sejumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, dengan persentase nilai sebesar 89.45%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai setiap anggota Satgaspamtas mengetahui jumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggung jawab masing-masing Pos Pamtas, yaitu dengan persentase nilai sebesar 89.45%.

(2) Jumlah patok batas negara yang hilang  
Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas saat melaksanakan patroli menemukan patok rusak, selalu membuat laporan sering terjadi kerusakan patok batas kepada satuan atas, dengan persentase nilai sebesar 82.42%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya patok batas negara yang rusak disebabkan oleh kondisi cuaca dan minimnya pengawasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 79.34%.

(3) Jumlah patok yang rusak diperbatasan.  
Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas saat melaksanakan patroli yang menemukan patok rusak, selalu membuat laporan adanya kerusakan patok batas kepada satuan atas, dengan persentase nilai sebesar 85.82%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai adanya patok batas negara yang rusak disebabkan oleh kondisi cuaca dan minimnya pengawasan, yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 71.62%.

(4) Jumlah patok yang bergeser diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai setiap Pos Pamtas mempunyai data koordinat kedudukan setiap patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, dengan persentase nilai sebesar 88.89%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin melaksanakan patroli untuk mengetahui jumlah patok batas yang bergeser, yaitu dengan persentase nilai sebesar 86.37%.

(5) Jumlah patok yang ideal diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas dapat mengawasi setiap patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, dengan persentase nilai sebesar 87.78%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai setiap anggota Pos Pamtas mengetahui jarak antar Patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, yaitu dengan persentase nilai sebesar 87.47%.

e) Mencegah pelintas batas illegal.

(1) Penyelundupan barang. Kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas mengalami kesulitan dalam menemukan penyelundupan senjata dan muhandak di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 57.8%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas pernah menemukan dan menangkap penyelundupan BBM di daerah perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 50.89%.

Penyelundupan orang. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai Warga negara asing (PNG) banyak tinggal di daerah perbatasan Papua tanpa memiliki ijin resmi, dengan persentase nilai sebesar 54.67%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai Penduduk Papua banyak eksodus ke negara PNG tanpa memiliki ijin resmi, yaitu dengan persentase nilai sebesar 52%.

(2) Kunjungan antar keluarga. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai Penduduk Papua bila pergi ke PNG untuk mengunjungi keluarganya biasanya menggunakan jalan tidak resmi, dengan persentase nilai sebesar 54.51%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai warga PNG bila pergi ke Papua untuk mengunjungi keluarganya yang berada di Papua biasanya menggunakan jalan tidak resmi, yaitu dengan persentase nilai sebesar 53.63%.

(3) Pengawasan jalur tradisional. Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai warga negara PNG setiap hari banyak pergi ke wilayah Papua untuk bekerja melalui jalan pintas, dengan persentase nilai sebesar 55.33%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pelaku penyelundupan BBM dan Sembako menggunakan lorong tikus untuk menghindari pengawasan dari anggota Pos Pamtas, yaitu dengan persentase nilai sebesar 42%.

(4) Pencurian SDA. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai kegiatan pencurian sumber daya alam terjadi karena luasnya medan, dengan persentase nilai sebesar 72.53%. Sedangkan nilai

terendah berada pada pertanyaan mengenai kegiatan pencurian sumber daya alam (terutama hasil hutan) di perbatasan dikendalikan oleh sindikat pencurian internasional di PNG, yaitu dengan persentase nilai sebesar 60%.

f) Pembinaan masyarakat.

(1) Pengetahuan anggota tentang aturan/ ketentuan pelintas batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas saat melaksanakan latihan pratugas sudah dibekali pengetahuan tentang ketentuan/aturan yang berlaku bagi setiap pelintas batas, dengan persentase nilai sebesar 88.35%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai buku yang berisi petunjuk dan ketentuan yang berlaku bagi setiap pelintas batas tersedia di setiap Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 87.91%.

(2) Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketentuan pelintas batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai Danpos Pamtas yang bekerjasama dengan petugas Imigrasi untuk mensosialisasikan aturan/ketentuan yang berlaku bagi setiap pelintas batas, dengan persentase nilai sebesar 87.47%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai masyarakat yang biasanya mengundang perwakilan anggota Pos Pamtas untuk menghadiri hajatan masyarakat di daerah perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 81.54%.

(3) Kegiatan membantu masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas yang bertugas di perbatasan biasanya

melakukan kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota Pos, dengan persentase nilai sebesar 83.08%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas yang berada di setiap Pos biasanya memelihara hewan ternak seperti Ayam, Bebek dan Kambing selama bertugas di perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 79.78%.

(4) Pembinaan semangat kebangsaan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas ada yang diminta masyarakat untuk mengajar di sekolah yang berada di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 91.21%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat dihadiri oleh aparat desa dan para tokoh masyarakat, yaitu dengan persentase nilai sebesar 82.86%.

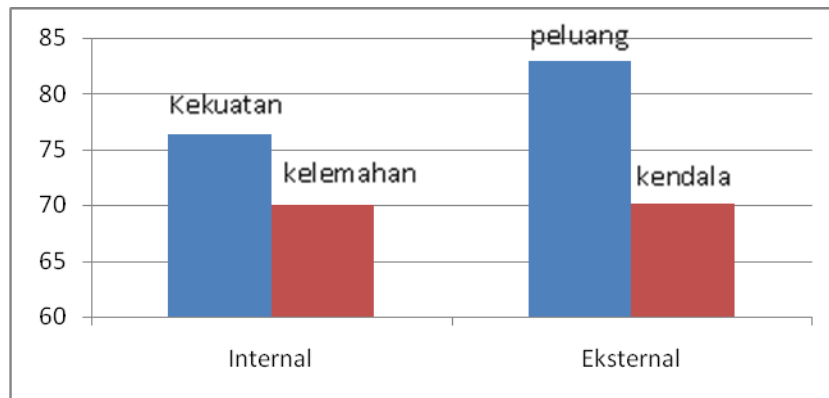
(5) Peringatan hari besar nasional. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas bekerjasama dengan aparat desa dan masyarakat mengadakan upacara bendera setiap memperingati hari besar nasional, dengan persentase nilai sebesar 88.35%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas bekerjasama dengan masyarakat mengadakan kegiatan lomba olahraga setiap memperingati hari besar nasional, yaitu dengan persentase nilai sebesar 88.13%.

(6) Pembinaan kesadaran hukum. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan anggota Pos Pamtas secara rutin mengadakan sosialisasi dan pembinaan

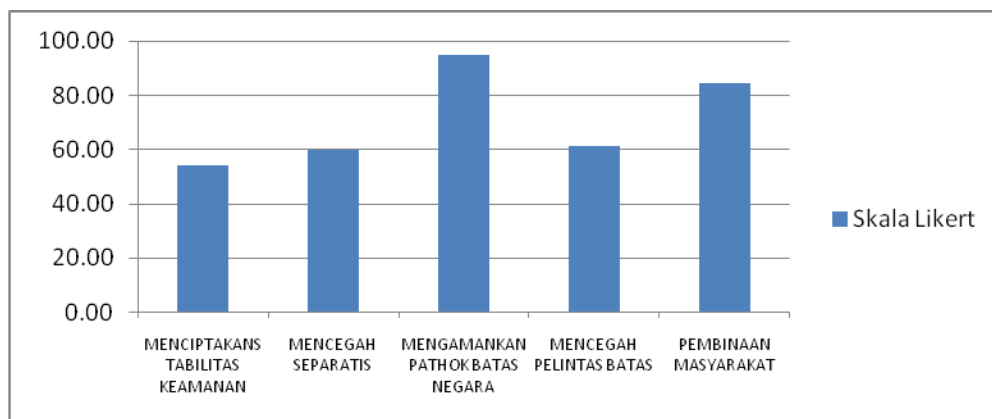
terkait dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan persentase nilai sebesar 86.37%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang kesadaran hukum masyarakat terkait dengan aturan perbatasan masih rendah, yaitu dengan persentase nilai sebesar 78.9%.

(7) Pembinaan teritorial terbatas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota pos Pamtas secara rutin mengadakan pembinaan teritorial terbatas (Bintertas) dalam bentuk antara lain : Karya bakti dan anjangsana, dengan persentase nilai sebesar 87.91%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang masyarakat yang menyambut dan menerima kegiatan Bintertas dengan antusias, yaitu dengan persentase nilai sebesar 85.68%.

2) Faktor pengaruh pada kelompok responden Pemda. Pada gambar 4.2. diagram di bawah dapat terlihat nilai skala yang menunjukkan faktor pengaruh dilihat dari kelompok responden Pemda. Faktor internal merupakan faktor pengaruh yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan kendala. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa faktor kekuatan dan peluang yang menjadi dorongan positif masih menunjukkan nilai yang dominan dibandingkan dengan tantangan dan kendala.

**Gambar 4.2****Diagram Faktor Pengaruh Untuk Kelompok Responden Pemda**

b. **Responsi Anggota Satgaspamtas.** Perhitungan skala Likert juga dilakukan untuk kelompok responden Anggota Satgaspamtas. Gambar 4.3 menunjukkan angka skala Likert untuk kelompok Responden Anggota Satgaspamtas. Pertanyaan yang ditanyakan serupa dengan pertanyaan untuk kelompok responden Pemerintah Daerah, yang meliputi faktor menciptakan stabilitas keamanan, mencegah separatisme, mengamankan batas patok negara, mencegah pelintas batas dan faktor pembinaan masyarakat.

**Gambar 4.3****Diagram Nilai Skala Likert Pada Responden Anggota Satgaspamtas**

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa secara umum kelompok Responden Anggota Satgaspamtas memandang perannya sendiri sebagai Satgaspamtas cukup penting dengan nilai rata-rata sebesar 67,27% (kuat). Anggota Satgaspamtas memandang peran satgas dalam menjaga patok

sudah sangat baik (94.56%), dan yang juga menggembirakan adalah Anggota Satgaspamtas memandang peran satgas dalam ikut membina masyarakat sangat besar (84.28 %). Namun demikian, dari aspek menciptakan stabilitas keamanan dan mencegah separatisme, responden Anggota Satgaspamtas masih menilai baru pada tahap cukup. Diagram berikut menggambarkan komposisi jawaban responden Anggota Satgaspamtas.

- 1) Hasil wawancara menurut responden Satgaspamtas.
  - a) Kelompok pertanyaan menciptakan stabilitas keamanan, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:
    - (1) Kerjasama antar aparat keamanan Satgaspamtas, Satkowil, Polisi, TNI AU dan TNI AL, Nilai tertinggi komponen pada faktor ini berasal dari penilaian terhadap pertanyaan mengenai apakah pada masa depan tim Satgaspamtas perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi modern dan pengetahuan internasional. Pertanyaan ini memiliki persentase nilai sebesar 91.2 %. Sedangkan nilai komponen terendah berasal dari pertanyaan mengenai apakah keberadaan pangkalan asing di Papua bermanfaat positif bagi keamanan perbatasan. Persentase penilaian yang diperoleh untuk pertanyaan ini adalah 46.7 %.
    - (2) Kerjasama antar aparat keamanan dengan Pemda. Nilai tertinggi yang diperoleh pada faktor ini berasal dari pertanyaan mengenai pendapat responden mengenai keberadaan program kegiatan bersama dalam pembinaan masyarakat di perbatasan. Persentase penilaian untuk pertanyaan tersebut memiliki nilai sebesar 87.97%. Sedangkan nilai terendah diperoleh dari pertanyaan mengenai pendapat responden mengenai penanganan masalah apakah selalu diinformasikan ke Pemda setempat dengan persentase sebesar 70.95%.

(3) Kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat. Nilai tertinggi yang diperoleh pada faktor ini berasal dari pertanyaan mengenai pendapat responden tentang keberadaan dukungan masyarakat perbatasan terhadap Satgaspamtas, yaitu sebesar 89.05%. Nilai terendah pada faktor ini diperoleh untuk pertanyaan mengenai pendapat responden tentang pengetahuan sebagian besar masyarakat perbatasan mengetahui batas negara RI dan PNG, yaitu sebesar 72.72%.

(4) Penegakan disiplin dan penegakan hukum. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadi perselisihan/ kesalahpahaman antara anggota Satgas-pamtas RI dan PNG, dengan persentase nilai sebesar 38.62%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai apakah sering terjadi anggota Satgaspamtas yang meninggalkan pos untuk kepentingan pribadi, yaitu dengan persentase nilai sebesar 35.42%.

b) Kelompok pertanyaan keamanan wilayah, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Konflik antar etnis. Kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya perselisihan antar etnis pendatang dengan penduduk setempat di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 42.46%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai apakah sering terjadi perselisihan antar umat beragama di daerah perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 37.46%.

(2) Teror (Intimidasi). Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya ancaman dari GSPB terhadap perusahaan setempat, dengan persentase nilai sebesar 47.37%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering

terjadi ancaman dari GSPB terhadap Satgaspamtas., yaitu dengan persentase nilai sebesar 44.40%.

(3) Penyelundupan senjata dan muhandak. Kelompok faktor ini terdiri dari 6 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadinya Senpimuhandak yang disita Satgaspamtas di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 47.37%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya penyelundupan senjata (Sapimubadak) keluar perbatasan RI, yaitu dengan persentase nilai sebesar 35.98%.

c) Kelompok pertanyaan mencegah kegiatan gerakan separatis, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Mencegah kegiatan Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB) Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai adanya usaha Satgaspamtas untuk mencegah GSPB yang mempengaruhi masyarakat perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 91.19%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSPB) yang berusaha membuat daerah perbatasan sebagai basis operasi gerakan separatis bersenjata, yaitu dengan persentase nilai sebesar 50.24%.

(2) Mencegah kegiatan Gerakan Separatis Papua Politik (GSPP). Kelompok pertanyaan pada faktor ini terbagi ke dalam 2 bagian yaitu kelompok sub pertanyaan mengenai Infiltrasi politik dan infiltrasi bersenjata. Nilai tertinggi untuk kelompok pertanyaan infiltrasi politik diperoleh pada pertanyaan mengenai sering terjadi anggota GSPP yang minta dukungan politik kepada negara lain, dengan persentase nilai sebesar 47.88%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadinya anggota

masyarakat yang minta swaka politik kepada negara lain, yaitu dengan persentase nilai sebesar 43.73%. Untuk kelompok sub pertanyaan infiltrasi bersenjata, nilai tertinggi diperoleh pada pertanyaan mengenai adanya kejadian penangkapan senjata dari luar negeri terhadap GSPP di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 53.98%. Sedangkan nilai terendah diperoleh dari pertanyaan adanya anggota satgaspamtas yang mengetahui adanya penyelundupan senjata di perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 47.89%.

(3) Kegiatan Lintas Batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai adanya penangkapan terhadap barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen, dengan persentase nilai sebesar 71.8%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai sering terjadi adanya pelintas batas tradisional di perbatas RI-PNG tidak dilengkapi dengan visa, yaitu dengan persentase nilai sebesar 61.96%.

d) Mengamankan patok batas negara, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Jumlah patok batas negara. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai setiap anggota Satgaspamtas mengetahui jumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggung jawab masing-masing Pos Pamtas, dengan persentase nilai sebesar 90.82%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas melaksanakan patroli secara rutin untuk mengecek sejumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 90.30%.

(2) Jumlah patok batas negara yang hilang. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan

mengenai setiap anggota Satgaspamtas mengetahui jumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggung jawab masing-masing Pos Pamtas, dengan persentase nilai sebesar 90.82%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas melaksanakan patroli secara rutin untuk mengecek sejumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 90.30%.

(3) Jumlah patok yang rusak diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas saat melaksanakan patroli yang menemukan patok rusak, selalu membuat laporan adanya kerusakan patok batas kepada satuan atas, dengan persentase nilai sebesar 85.82%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai adanya patok batas negara yang rusak disebabkan oleh kondisi cuaca dan minimnya pengawasan, yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 71.62%.

(4) Jumlah patok yang bergeser diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai setiap Pos Pamtas mempunyai data koordinat kedudukan setiap patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, dengan persentase nilai sebesar 89.44%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin melaksanakan patroli untuk mengetahui jumlah patok batas yang bergeser, yaitu dengan persentase nilai sebesar 84.85%.

(5) Jumlah patok yang ideal diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai setiap anggota Pos Pamtas mengetahui jarak antar Patok batas negara yang berada di wilayah

tanggungjawabnya, dengan persentase nilai sebesar 88.74%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas dapat mengawasi setiap patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, yaitu dengan persentase nilai sebesar 87.53%.

e) Mencegah pelintas batas illegal.

(1) Penyelundupan barang. Kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas pernah menemukan penyelundupan senjata dan Muhandak di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 53.71%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas pernah menemukan dan menangkap penyelundupan BBM di daerah perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 50.87%.

(2) Penyelundupan orang. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai Warga negara asing (PNG) banyak tinggal di daerah perbatasan Papua tanpa tanpa memiliki ijin resmi, dengan persentase nilai sebesar 54.76%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai Penduduk Papua banyak eksodus ke negara PNG tanpa memiliki ijin resmi, yaitu dengan persentase nilai sebesar 47.97%.

(3) Kunjungan antar keluarga. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang Penduduk Papua bila pergi ke PNG untuk mengunjungi keluarganya biasanya menggunakan jalan tidak resmi, dengan persentase nilai sebesar 53.59%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang warga PNG bila pergi ke Papua untuk mengunjungi keluarganya yang berada di Papua biasanya

menggunakan jalan tidak resmi, yaitu dengan persentase nilai sebesar 52.9%.

(4) Pengawasan jalur tradisional. Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang warga negara PNG setiap hari banyak pergi ke wilayah Papua untuk bekerja melalui jalan pintas, dengan persentase nilai sebesar 53.9%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang pelaku penyelundupan BBM dan Sembako menggunakan lorong tikus untuk menghindari pengawasan dari anggota Pos Pamantas, yaitu dengan persentase nilai sebesar 42.55%.

(5) Pencurian SDA. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang kegiatan pencurian sumber daya alam terjadi karena luasnya medan, dengan persentase nilai sebesar 63.98%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang kegiatan pencurian sumber daya alam (terutama hasil hutan) di perbatasan dikendalikan oleh sindikat pencurian internasional di PNG, yaitu dengan persentase nilai sebesar 52.34%.

f) Pembinaan masyarakat.

(1) Pengetahuan anggota tentang aturan/ ketentuan pelintas batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamantas saat melaksanakan latihan praturgas sudah dibekali pengetahuan tentang ketentuan/aturan yang berlaku bagi setiap pelintas batas, dengan persentase nilai sebesar 89.05%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai buku yang berisi petunjuk dan ketentuan yang berlaku bagi setiap pelintas batas

tersedia di setiap Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 88.27%.

(2) Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketentuan pelintas batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai Danpos Pamtas bekerjasama dengan petugas Imigrasi untuk mensosialisasikan aturan/ketentuan yang berlaku bagi setiap pelintas batas, dengan persentase nilai sebesar 86.23%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai masyarakat yang biasanya mengundang perwakilan anggota Pos Pamtas untuk menghadiri hajatan masyarakat di daerah perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 80.09%.

(3) Kegiatan membantu masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas yang bertugas di perbatasan biasanya melakukan kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota Pos, dengan persentase nilai sebesar 79.26%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas yang berada di setiap Pos biasanya memelihara hewan ternak seperti Ayam, Bebek dan Kambing selama bertugas di perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 76.58%.

(4) Pembinaan semangat kebangsaan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas ada yang diminta masyarakat untuk mengajar di sekolah yang berada di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 85.76%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat dihadiri oleh aparat

desa dan para tokoh masyarakat, yaitu dengan persentase nilai sebesar 82.77%.

(5) Peringatan hari besar nasional. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas bekerjasama dengan aparat desa dan masyarakat mengadakan upacara bendera setiap memperingati hari besar nasional, dengan persentase nilai sebesar 87.71%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas bekerjasama dengan masyarakat mengadakan kegiatan lomba olahraga setiap memperingati hari besar nasional, yaitu dengan persentase nilai sebesar 86.88%.

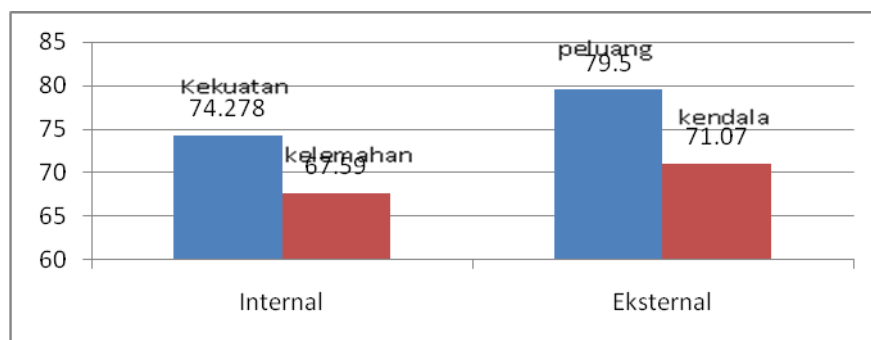
(6) Pembinaan kesadaran hukum. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan anggota Pos Pamtas secara rutin mengadakan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan persentase nilai sebesar 84.07%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang kesadaran hukum masyarakat terkait dengan aturan perbatasan masih rendah, yaitu dengan persentase nilai sebesar 75.88%.

(7) Pembinaan teritorial terbatas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota pos Pamtas secara rutin mengadakan pembinaan teritorial terbatas (Bintertas) dalam bentuk antara lain: Karya bakti dan anjangsana, dengan persentase nilai sebesar 89.7%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang masyarakat yang menyambut dan menerima kegiatan Bintertas dengan antusias, yaitu dengan persentase nilai sebesar 87.73%.

2) Faktor pengaruh pada kelompok responden anggota Satgaspamtas. Secara umum, dilihat dari nilai skala untuk faktor pengaruh dari kelompok responden Anggota Satgaspamtas, dapat terlihat nilai skala tergolong tinggi untuk komponen kekuatan dan peluang. Sedangkan komponen kelemahan dan tantangan terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan komponen lain yang terdapat dalam kelompok faktor pengaruhnya masing-masing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pengaruh yang lebih dominan merupakan faktor pengaruh yang bersifat positif menurut kelompok responden anggota Satgaspamtas. Nilai masing-masing komponen faktor pengaruh dapat dilihat pada diagram batang gambar 4.4. berikut ini.

**Gambar 4.4.**

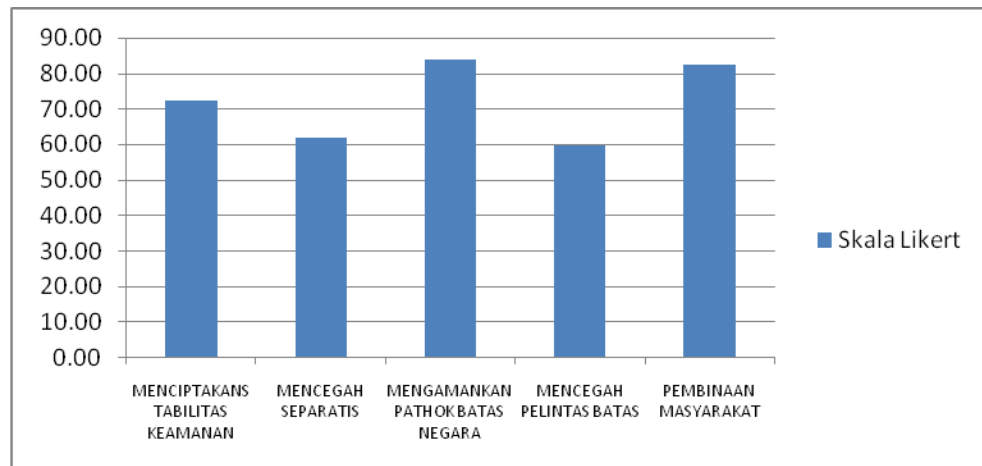
**Diagram Faktor Pengaruh Untuk Kelompok Responden Anggota Satgaspamtas**



**c. Responsi Responden TNI AL, TNI AU dan Kepolisian.**

Selain pemda dan anggota Satgaspamtas, kuesioner juga ditanyakan kepada kelompok responden anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian dengan bentuk pertanyaan yang sama. Gambar 4.5 juga menunjukkan angka skala Likert untuk kelompok Responden Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian. Hasil dari perhitungan skala Likert untuk kelompok responden ini juga dapat dilihat berdasarkan masing-masing faktor, yaitu menciptakan stabilitas keamanan, mencegah separatisme, mengamankan batas patok negara, mencegah pelintas batas dan faktor pembinaan masyarakat.

**Gambar 4.5**  
**Diagram Nilai Skala Likert Pada Responden**  
**Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian**



Dari gambar 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kelompok Responden Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian memandang peran Satgaspamtas penting dengan nilai rata-rata sebesar 71,57% (kuat). Anggota TNI lainnya seperti halnya kelompok responden Pemda dan Anggota Satgaspamtas juga memandang peran dalam menjaga patok sudah sangat baik (84%), yang juga menggembirakan adalah Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian memandang peran satgas dalam ikut membina masyarakat sangat besar (82.57 %). Namun demikian, dari aspek menciptakan stabilitas keamanan dan mencegah pelintas batas, responden Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian masih menilai baru pada tahap cukup. Diagram berikut menggambarkan komposisi jawaban responden Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian.

- 1) Hasil wawancara menurut responden TNI lainnya.
  - a) Kelompok pertanyaan menciptakan stabilitas keamanan, yang terdiri dari 14 pertanyaan. Presentase nilai skala Likert tertinggi untuk kelompok pertanyaan ini memiliki nilai 88% yang berasal dari pertanyaan mengenai pendapat responden tentang Pos Pamtas selalu bekerjasama dengan aparat Kepolisian dalam menciptakan stabilitas keamanan di parbatasan. Sedangkan presentase nilai terendah untuk kelompok ini berasal dari pertanyaan mengenai kekuatan Satgaspamtas saat ini apakah sudah memenuhi syarat sebagai Satgaspamtas dengan nilai presentase sebesar 56%.

b) Kelompok pertanyaan mencegah kegiatan gerakan separatis, yang terdiri dari dua bagian kelompok pertanyaan, yaitu:

(1) Kegiatan Infiltrasi. Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap kondisi sering terjadinya gerakan Separatis Papua Politik (GSPP) berusaha memasukkan budaya negara asing untuk mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di perbatasan dan juga pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap gerakan Separatis Papua Politik (GSPP) berusaha mempengaruhi masyarakat untuk membenturkan masyarakat dengan anggota Pos Pamantas, dengan persentase nilai sebesar 76%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang kondisi apabila gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSPB) berusaha membuat daerah perbatasan sebagai basis operasi gerakan separatis bersenjata, yaitu dengan persentase nilai sebesar 52%.

(2) Kegiatan Lintas Batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang GSPB yang sering melakukan kegiatan lintas batas di perbatasan Papua, dengan persentase nilai sebesar 64%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap kondisi apabila kelompok Gerakan Separatis berusaha memanfaatkan kegiatan lintas batas untuk mempengaruhi masyarakat di perbatasan Papua, yaitu dengan persentase nilai sebesar 40 %.

b) Mengamankan patok batas negara, yang terdiri dari kelompok pertanyaan sebagai berikut:

(1) Jumlah patok batas negara. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini

diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas melaksanakan patroli secara rutin untuk mengecek sejumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, dengan persentase nilai sebesar 92%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai setiap anggota Satgaspamtas mengetahui jumlah patok batas negara yang berada di wilayah tanggung jawab masing-masing Pos Pamtas, yaitu dengan persentase nilai sebesar 88%.

(2) Jumlah patok batas negara yang hilang. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas, apabila saat melaksanakan Patroli menemukan patok hilang selalu membuat laporan kehilangan kepada satuan atas, dengan persentase nilai sebesar 84%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin melaksanakan patroli untuk mengecek patok batas negara yang hilang, yaitu dengan persentase nilai sebesar 80%.

(3) Jumlah patok yang rusak diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas saat melaksanakan patroli menemukan patok rusak, selalu membuat laporan adanya kerusakan patok batas kepada satuan atas, dengan persentase nilai sebesar 88%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap adanya patok batas negara yang rusak disebabkan oleh kondisi cuaca dan minimnya pengawasan, yang berada di wilayah tanggungjawab Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 76%.

(4) Jumlah patok yang bergeser diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai setiap Pos Pamtas mempunyai data koordinat kedudukan setiap patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, dengan persentase nilai sebesar 92%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin melaksanakan patroli untuk mengetahui jumlah patok batas yang bergeser, yaitu dengan persentase nilai sebesar 84%.

(5) Jumlah patok yang ideal diperbatasan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai setiap anggota Pos Pamtas mengetahui jarak antar Patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, dengan persentase nilai sebesar 84%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas dapat mengawasi setiap patok batas negara yang berada di wilayah tanggungjawabnya, yaitu dengan persentase nilai sebesar 72%.

c) Mencegah pelintas batas illegal.

(1) Penyelundupan barang. Kelompok faktor ini terdiri dari 3 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas mengalami kesulitan dalam menemukan penyelundupan senjata dan muhandak di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 68%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas pernah menemukan dan menangkap penyelundupan BBM di daerah perbatasan dan pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap anggota Pos Pamtas pernah menemukan penyelundupan Sembako di daerah

perbatasan, yaitu dengan persentase nilai sebesar 52%.

(2) Penyelundupan orang. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai Penduduk Papua banyak eksodus ke negara PNG tanpa memiliki ijin resmi, dengan persentase nilai sebesar 64%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai Warga negara asing (PNG) banyak tinggal di daerah perbatasan Papua tanpa memiliki ijin resmi, yaitu dengan persentase nilai sebesar 40%.

(3) Kunjungan antar keluarga. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Kedua pertanyaan untuk kelompok ini memiliki persentase nilai yang sama, yaitu 68%.

(4) Pengawasan jalur tradisional. Kelompok faktor ini terdiri dari 4 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai pelaku illegal logging menggunakan lorong tikus untuk menyelundupkan hasil hutan dan pertanyaan mengenai pelaku penyelundupan BBM dan Sembako menggunakan lorong tikus untuk menghindari pengawasan dari anggota Pos Pamtas, dengan masing-masing persentase nilai sebesar 64%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai penduduk Papua setiap hari banyak pergi ke PNG untuk bekerja melalui jalan pintas, yaitu dengan persentase nilai sebesar 42%.

d) Pembinaan Masyarakat.

(1) Pengetahuan anggota tentang aturan/ ketentuan pelintas batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas saat melaksanakan latihan pratugas sudah dibekali pengetahuan tentang ketentuan/aturan yang berlaku

bagi setiap pelintas batas, dengan persentase nilai sebesar 92%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai buku yang berisi petunjuk dan ketentuan yang berlaku bagi setiap pelintas batas tersedia di setiap Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 88%.

(2) Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketentuan pelintas batas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai masyarakat yang biasanya mengundang perwakilan anggota Pos Pamtas untuk menghadiri hajatan masyarakat di daerah perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 76%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai Danpos Pamtas yang bekerjasama dengan petugas Imigrasi untuk mensosialisasikan aturan/ketentuan yang berlaku bagi setiap pelintas batas, yaitu dengan persentase nilai sebesar 72%.

(3) Kegiatan membantu masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas yang berada di setiap Pos biasanya memelihara hewan ternak seperti Ayam, Bebek dan Kambing selama bertugas di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 88%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Satgaspamtas yang bertugas di perbatasan biasanya melakukan kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota Pos, yaitu dengan persentase nilai sebesar 84%.

(4) Pembinaan semangat kebangsaan. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas ada yang diminta masyarakat untuk

mengajar di sekolah yang berada di perbatasan, dengan persentase nilai sebesar 92%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat dihadiri oleh aparat desa dan para tokoh masyarakat, yaitu dengan persentase nilai sebesar 80%.

(5) Peringatan hari besar nasional. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas bekerjasama dengan aparat desa dan masyarakat mengadakan upacara bendera setiap memperingati hari besar nasional, dengan persentase nilai sebesar 88%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai anggota Pos Pamtas bekerjasama dengan masyarakat mengadakan kegiatan lomba olahraga setiap memperingati hari besar nasional, yaitu dengan persentase nilai sebesar 80%.

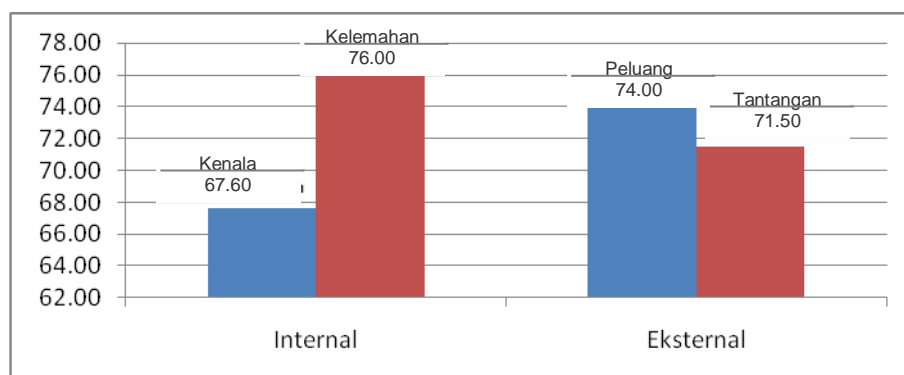
(6) Pembinaan kesadaran hukum. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan anggota Pos Pamtas secara rutin mengadakan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan persentase nilai sebesar 88%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang kesadaran hukum masyarakat terkait dengan aturan perbatasan masih rendah, yaitu dengan persentase nilai sebesar 64%.

(7) Pembinaan teritorial terbatas. Kelompok faktor ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nilai tertinggi untuk faktor ini diperoleh pada pertanyaan mengenai anggota pos Pamtas secara rutin mengadakan pembinaan teritorial terbatas (Bintertas) dalam bentuk antara lain: Karya

bakti dan anjangsana, dengan persentase nilai sebesar 88%. Sedangkan nilai terendah berada pada pertanyaan mengenai pendapat responden tentang masyarakat yang menyambut dan menerima kegiatan Bintertas dengan antusias, yaitu dengan persentase nilai sebesar 76%.

2) Faktor pengaruh pada kelompok responden anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian. Nilai faktor pengaruh yang diperoleh pada responden anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian ternyata memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan kelompok responden lainnya. Pada kelompok responden ini, dapat terlihat bahwa komponen kelemahan dan pada faktor internal menunjukkan nilai yang jauh lebih mendominasi jika dibandingkan dengan komponen kekuatan. Sedangkan untuk pengaruh eksternal, komponen peluang terlihat masih memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai komponen tantangan. Perbandingan nilai skala Likert untuk masing-masing faktor pengaruh dapat dilihat pada diagram batang gambar 4.6. berikut ini.

**Gambar 4.6**  
**Diagram Faktor Pengaruh Untuk Kelompok**  
**Responden Anggota TNI AL, TNI AU dan Kepolisian**



**d. Responsi Keseluruhan.**

Berdasarkan hasil survei pada responden Pemda, anggota Satgaspamtas, TNI AL, TNI AU dan Kepolisian, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan setiap komponen responden tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki nilai skala Likert yang tinggi untuk

pertanyaan faktor mengamankan patok batas negara dan pembinaan masyarakat. Kedua faktor tersebut menurut para responden telah menunjukkan tingginya peran satgas dalam pengamanan perbatasan. Kedua faktor ini menunjukkan sangat kuatnya peranan satgas dalam pengamanan perbatasan, ditunjukkan dengan nilai skala Likert lebih dari 80%. Sedangkan untuk faktor-faktor lain seperti penciptaan stabilitas keamanan, menurut responden Pemda dan Satgaspamtas dinilai masih menunjukkan peranan yang pada kategori cukup, yaitu hanya memiliki nilai skala Likert antara 50 % - 60%. Namun, menurut responden TNI AL, TNI AU dan Kepolisian, peranan satgas untuk faktor ini sudah tergolong kuat yang ditunjukkan dengan angka skala Likert lebih dari 70%.

Faktor lain seperti pencegahan pelintas batas dinilai memiliki peranan yang cukup menurut responden Pemda, Satgaspamtas dan TNI AL, TNI AU dan Kepolisian. Sedangkan untuk faktor pencegahan separatisme dinilai cukup oleh responden Satgaspamtas dan TNI AL, TNI AU dan Kepolisian, namun menurut Pemda, faktor ini sudah menunjukkan peranan satgas yang kuat dalam pengamanan wilayah perbatasan. Perbandingan nilai skala penilaian untuk masing-masing faktor berdasarkan jawaban dari ketiga kelompok responden tersebut, dapat dilihat pada rekapitulasi kuesioner seluruh responden pada tabel 4.1. Sedangkan hasil perhitungan nilai skala Likert secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar 4.7.

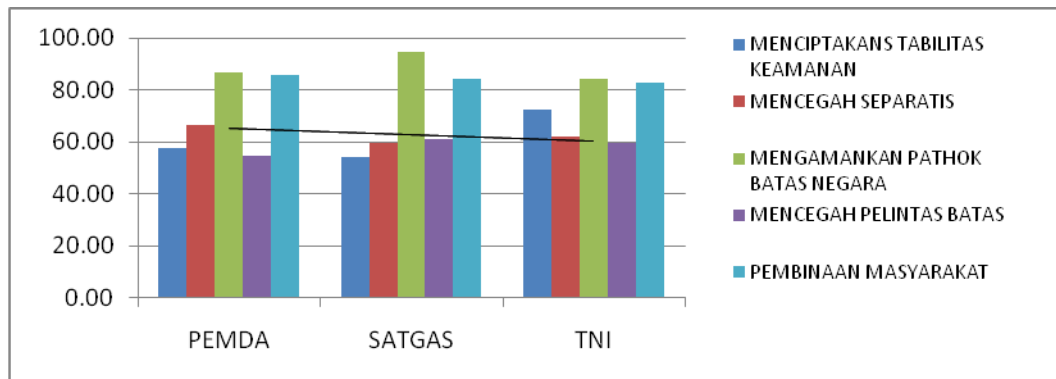
**TABEL 4.1**  
**REKAPITULASI KUESIONER SELURUH RESPONDEN**

KOMPONEN		SKALA LIKERT						
		PEMDA		SATGAS		TNI		rata-rata
<b>A</b>	<b>MENCIPTAKAN STABILITAS KEAMANAN</b>	<b>57.56</b>		<b>54.19</b>		<b>72.75</b>		<b>61.50</b>
1	Deterent efek		<b>71.58</b>		<b>69.30</b>		72.75	
a	Kerjasama antar aparat		80.47		76.20		82.00	
b	Kerjasama antar aparat dg Pemda		84.65		82.98		67.00	
c	Kerjasama aparat dengan masyarakat		84.77		81.31		68.00	
d	Penegakan disiplin dan penegakan hukum		36.43		36.72		74.00	
2	Keamanan Wilayah		<b>43.53</b>		<b>39.07</b>			
a	Konflik antar etnis		41.98		30.5		*	
b	Aksi Teror		41.87		45.6		*	
c	Penyelundupan		46.74		41.12		*	

<b>B</b>	<b>MENCEGAH SEPARATIS</b>	<b>66.71</b>		<b>59.80</b>		<b>59.5</b>		<b>62.01</b>
a	Mencegah GSPB		79.89		80.36		*	
b	Mencegah GSPP		68.13		45.43		*	
c	Kegiatan Infiltrasi		47.90		45.43		67.00	
d	Kegiatan Lintas Batas		70.93		67.97		52.00	
<b>C</b>	<b>MENGAMANKAN PATOK BATAS NEGARA</b>	<b>86.25</b>		<b>86.55</b>		<b>84.00</b>		<b>85.60</b>
a	Jumlah patok batas negara		89.26		90.56		90.00	
b	Jumlah patok batas negara yang hilang		87.14		88.19		82.00	
c	Jumlah patok yang rusak diperbatasan		80.88		78.74		82.00	
d	Jumlah patok yang bergeser diperbatasan		86.37		87.14		88.00	
e	Jumlah patok yang ideal diperbatasan.		87.63		88.14		78.00	
<b>D</b>	<b>MENCEGAH PELINTAS BATAS</b>	<b>53.41</b>		<b>52.43</b>		<b>59.58</b>		<b>55.14</b>
a	Penyelundupan Barang		52.16		52.28		57.33	
b	Penyelundupan Orang		53.51		51.36		52.00	
c	Kunjungan Antar Keluarga		50.00		53.25		68.00	
d	Pengawasan Jalur Tradisional		52.46		47.12		58.00	
e	Pencurian SDA		58.95		58.16		64.00	
<b>E</b>	<b>PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>85.36</b>		<b>85.34</b>		<b>82</b>		<b>84.23</b>
a	Pengetahuan anggota ttg pelitas batas		88.35		88.66		90.00	
b	Sosialisai ttg pelintas batas		84.51		83.16		74.00	
c	Pembinaan semangat kebangsaan		81.43		84.26		86.00	
d	Peringatan hari besar nasional		87.03		87.29		84.00	
e	Pembinaan Kesadaran hukum.		88.24		79.97		76.00	
f	Pembinaan Teritorial Terbatas		82.64		88.71		82.00	
	<b>Rata-rata</b>	<b>69.86</b>		<b>67.27</b>		<b>71.57</b>		<b>69.70</b>
								<b>69.56</b>

**Keterangan** \* = Tidak ditanyakan

**Gambar 4.7**  
**Diagram Nilai Skala Likert Seluruh Komponen Responden**

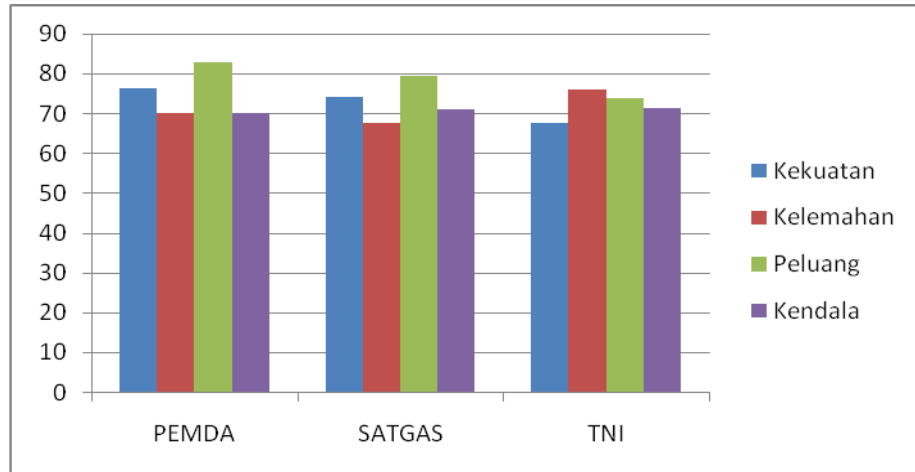


e. **Faktor Pengaruh secara Keseluruhan.** Penilaian masing-masing kelompok responden mengenai faktor pengaruh dalam peranan satgas pengamanan perbatasan cenderung menunjukkan penilaian yang seragam. Secara keseluruhan, untuk faktor pengaruh kekuatan, kelemahan dan kendala dinilai cukup kuat menurut seluruh kelompok responden yang terdiri dari Pemda, anggota Satgaspamtas, TNI AL, TNI AU dan Kepolisian. Sedangkan untuk faktor kekuatan, responden Satgaspamtas, TNI AL, TNI AU dan Kepolisian, memberikan penilaian yang cukup kuat mengenai peran satgas dalam pengamanan perbatasan, namun Pemda memberikan penilaian yang sangat kuat untuk faktor pengaruh ini. Perbandingan nilai faktor pengaruh secara keseluruhan dapat dilihat pada perhitungan nilai *skala likert* tabel 4.2. dan diagram faktor pengaruh pada gambar 4.8. berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Nilai Skala Likert untuk Faktor Pengaruh Menurut seluruh Responden**

No	RESPONDEN	PEMDA	SATGAS	TNI AL, AU & POL
	<b>Faktor Pengaruh</b>			
<b>a</b>	Internal			
	Kekuatan	76.38	74.278	67.60
	Kelemahan/ Tantangan	70.00	70.59	76.00
<b>b</b>	Eksternal			
	Peluang	82.91	79.50	74.00
	Kendala	70.18	71.07	71.50
	<b>Rata-rata</b>	<b>74,87</b>	<b>73.71</b>	<b>72.28</b>

**Gambar 4.8**  
**Diagram Nilai Skala Likert untuk Faktor Pengaruh**  
**Menurut Seluruh Responden**



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 22. Kesimpulan.

a. Dari proses penelitian terhadap peran Satgaspamtas Wilayah Darat RI-PNG dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di Papua dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Melihat komponen utama menciptakan stabilitas keamanan, dengan peran antara lain: pertama, meningkatkan daya tangkal wilayah dengan menjalin kerjasama dengan petugas kepolisian, pemerintah dan masyarakat guna mencegah setiap gangguan keamanan di perbatasan Papua; Kedua, memelihara disiplin prajurit dan menegakkan supremasi hukum di lingkungan masyarakat; Ketiga, menjunjung tinggi budaya daerah setempat dalam mencegah konflik antar etnis/suku; Keempat, mencegah kelompok separatis melakukan teror/intimidasi terhadap masyarakat, aparat pemerintah maupun pasukan Pamtas yang lengah dan terpencil, serta menjaga terhadap kemungkinan adanya penyelundupan Senpimuhandak. Dari komponen menciptakan stabilitas keamanan dihadapkan dengan seluruh responden didapatkan nilai rata-rata 61,50%.

2) Untuk komponen utama mencegah gerakan separatis, dengan peran antara lain: Pertama, mencegah kegiatan gerakan separatis bersenjata dengan berusaha mencari menemukan dan menangkap kelompok separatis bersenjata yang melakukan teror di perbatasan Papua; Kedua, mencegah kegiatan gerakan separatis politik yang berusaha mempengaruhi masyarakat di perbatasan Papua; Ketiga, mencegah kegiatan infiltrasi dari negara asing melalui wilayah perbatasan. Dari komponen utama mencegah gerakan separatis dihadapkan dengan seluruh responden didapatkan nilai rata-rata 62,01%.

3) Komponen utama mengamankan patok batas negara dengan melaksanakan patroli secara rutin dan terencana untuk menjaga dan mengawasi pilar patok batas negara agar tidak rusak, bergeser maupun hilang. Dari komponen utama mengamankan patok batas negara dihadapkan dengan seluruh responden didapatkan nilai rata-rata 85,60%.

4) Komponen utama mencegah pelintas batas negara dengan peran antara lain: Pertama, mencegah penyelundupan barang yang dapat merugikan negara; Kedua, mencegah pelaku pelintas batas illegal; Ketiga, mengawasi masyarakat yang berkunjung ke keluarganya yang berada di PNG; Keempat, mengawasi jalur tradisional yang sering digunakan masyarakat untuk berkunjung ke negara tetangga PNG; Kelima, Mencegah pelaku pencurian SDA yang dapat merugikan negara. Dari komponen utama mencegah pelintas batas negara dihadapkan dengan seluruh responden didapatkan nilai rata-rata 55,14%.

5) Komponen utama melaksanakan pemberdayaan wilayah dengan melakukan: Pertama, melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketentuan yang berlaku bagi pelintas batas; Kedua, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melakukan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan; Ketiga, mengadakan upacara bersama dengan masyarakat setiap memperingati hari besar nasional; Keempat, membina kesadaran hukum bagi masyarakat di perbatasan; Kelima, mengajak masyarakat untuk melaksanakan karya bhakti untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dari komponen utama melaksanakan pemberdayaan wilayah dihadapkan dengan seluruh responden didapatkan nilai rata-rata 84,23%.

b. Dari hasil penelitian terhadap Satgaspamtas diukur dengan analisa **Skala Likert** mencapai nilai rata-rata 69.56% (kuat) dari seluruh komponen responden, sedangkan ditinjau dari seluruh komponen utama quesioner mencapai nilai rata-rata 69.70% (kuat). Dengan demikian secara keseluruhan hasil penelitian mengindikasikan bahwa Satgaspamtas sudah melaksanakan perannya dengan **kategori baik** dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan wilayah darat RI-PNG.

## 23. **Saran.**

a. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisa *Skala Likert* ditinjau dari komponen utama menciptakan stabilitas keamanan dan mencegah pelintas batas maupun mencegah illegal SDA dihadapkan dengan seluruh responden masih dalam kategori cukup, sehingga perlunya ditingkatkan peran Satgaspamtas dalam komponen utama menciptakan stabilitas keamanan dan pelintas batas illegal.

b. Faktor-faktor penunjang yang mempengaruhi peran Satgaspamtas yang selama ini menjadi kelemahan dan kendala yang berasal dari faktor internal TNI antara lain, sarana alat komunikasi dan sarana transportasi serta jumlah kekuatan yang digelar perlunya untuk segera didukung dengan harapan peran Satgaspamtas akan lebih optimal.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Demikian hasil penelitian peran Satgaspamtas RI-PNG dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI semoga dapat bermanfaat untuk kepentingan TNI AD.

Bandung,   Desember 2010  
Komandan Seskoad

Nanang Djuana Priadi  
Mayor Jenderal TNI